



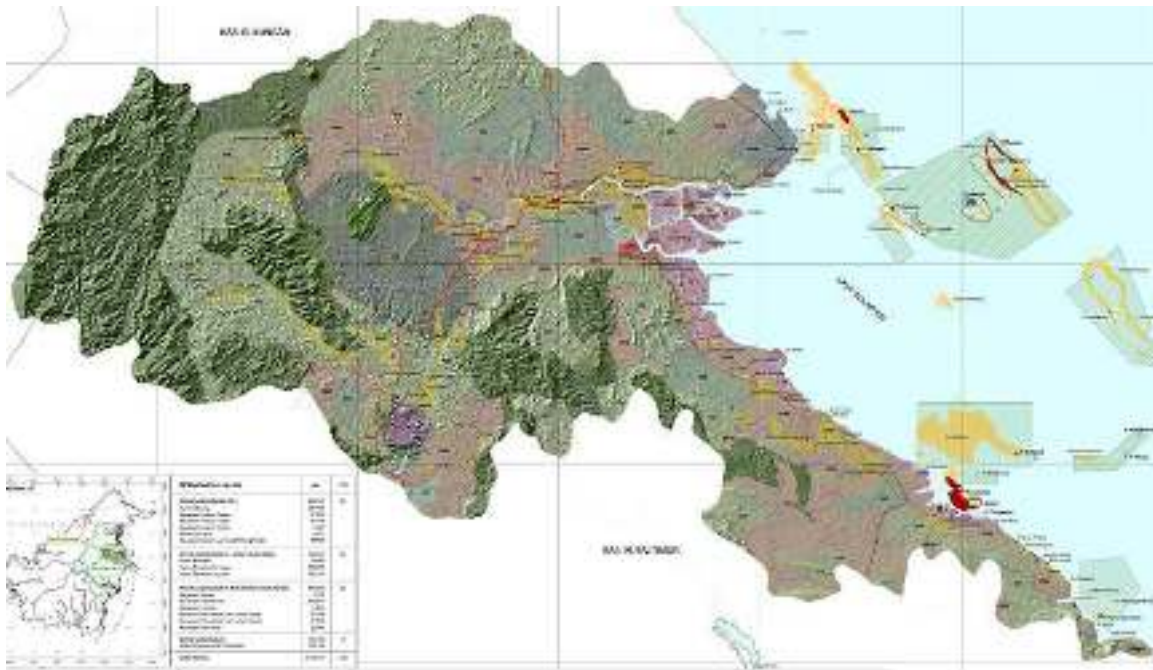
**Peraturan Daerah Kabupaten Berau
Nomor 02 Tahun 2006
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Berau Tahun 2005**



**Diperbanyak Oleh :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Berau**



DRAFT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2006-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN BERAU**

TANJUNG REDEB, Juli 2005



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2006-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan Komprehensif;
- b. bahwa program Pembangunan Jangka Panjang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Berau yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta menjadi instrument monitoring dan evaluasi bagi arah kebijakan dan program serta kegiatan Lima Tahunan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau.

Mengingat

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2000;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kebutuhan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengaturan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dan

BUPATI BERAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2006-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026, yang selanjutnya disebut dengan RPJP Kabupaten Berau adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Berau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026

BAB II

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Pasal 2

- (1) RPJP Kabupaten Berau memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Berau yang mengacu pada RPJP Nasional;
- (2) RPJPD Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3

Pemerintah Daerah melaksanakan arah pembangunan dalam RPJP Daerah Kabupaten Berau yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau;

Pasal 4

Kepala Bappeda Kabupaten Berau melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Berau yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau;

Pasal 5

RPJP Daerah Kabupaten Berau adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

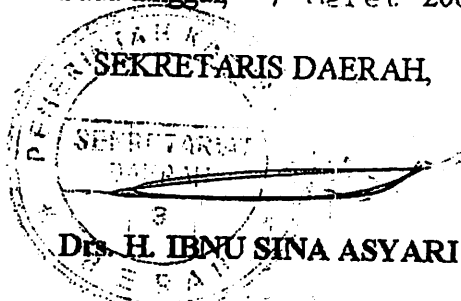
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tanjung Redeb,
pada tanggal, 7 Maret 2006


BURAI BERAU,
Drs. H. MAKMUL. HAPK, MM

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 7 Maret 2006


SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Penyusunan
- 1.4. Hubungan RPJP Nasional, RPJP Daerah dan RPJM Daerah
- 1.5. Sistematika Penulisan RPJP Kab. Berau

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Ekonomi
- 2.3. Sumber Daya Manusia
- 2.4. Fisik dan Prasarana
- 2.5. Sosial Budaya
- 2.6. Hukum dan Pemerintahan

BAB III MODAL DASAR PEMBANGUNAN DAN FAKTOR STRATEGIS

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi

BAB V ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

- 5.1. Mewujudkan perekonomian daerah dengan berorientasi kerakyatan, memiliki daya saing dan berkelanjutan
 - 5.2. Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM yang menguasai IPTEK dan IMTAK
- Mengembangkan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- Menumbuh kembangkan budaya daerah menuju masyarakat yang madani
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan kepentingan publik

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM untuk setiap jangka waktu lima tahunan oleh pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih bersama dengan DPRD.

Dalam RPJP ini, memuat rumusan Visi, Misi, Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Berau, dengan mendasarkan diri pada angka PDRB dan (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah; (4) kapasitas fiskal dan keuangan daerah; dan (5) statistik bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

RPJPD sebagai dokumen publik yang memuat arah dan kebijakan pembangunan dua puluh tahun ke depan, sehingga proses penyusunan RPJP Daerah ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. Karena pertimbangan

itu, rumusan Visi, Misi, Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah di dalam dokumen RPJPD ini adalah merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap mengacu Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN).

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah 2006-2026 disusun dengan maksud memberikan arah bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 2006-2026 untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai sentra industri dan daerah ekowisata berbasis pertanian dan kelautan terkemuka di wilayah Indonesia Timur tahun 2026.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJP Daerah Kabupaten Berau ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam merumuskan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan umum yang dituangkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk memahami serta menjadi instrumen monitoring dan evaluasi bagi arah kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan daerah.

1.3. Landasan Penyusunan

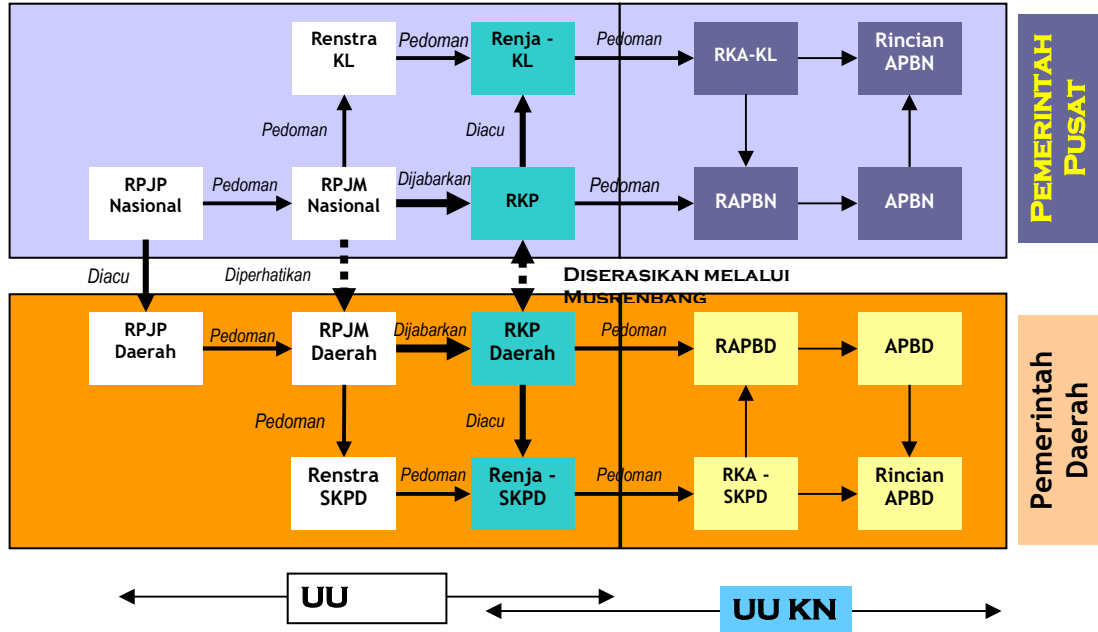
Dalam penyusunan RPJP Daerah ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400).
3. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
4. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.

1.4. Hubungan RPJP Nasional, RPJP Daerah dan RJPM Daerah .

Keterkaitan antara RPJP dengan RPJP Nasional, RPJP Daerah dan RPJM Daerah dijelaskan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

1.6. Sistematika Penulisan RPJP Daerah Kabupaten Berau

Sistematika Penulisan RPJP Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Kondisi Umum Daerah
- Bab III Modal Dasar Pembangunan dan Faktor Strategis
- Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Bab V Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Bab VI Kaidah Pelaksanaan
- Bab VII Penutup

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Berau selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan sarana prasarana, penataan kehidupan sosial budaya dan tata pemerintahan yang baik. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula permasalahan dan tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga masih perlu dilanjutkan upaya untuk mengatasinya dalam pembangunan daerah Kabupaten Berau 20 tahun ke depan.

2.1. Kondisi Geografis

Letak Wilayah. Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Letak daerah ini berada tidak jauh dari Garis Katulistiwa dengan posisi berada antara 116° sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° sampai dengan 2°33' Lintang Utara.

Keadaan Topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan bukit dan perbukitan yang terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan batu kapur memanjang dari hampir mencapai 100 Km. Selanjutnya di Kecamatan Talisayan terdapat perbukitan dan yang tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Sedangkan danau berjumlah 7 buah, keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Berau dengan luas keseluruhan danau mencapai 15 Ha.

Sebagai salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur bagian utara, kabupaten Berau juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil hutan lainnya, industri pulp dan batu bara ini mempunyai puluhan sungai yang

tersebar pada hampir semua daerah kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama disamping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang adalah Sungai Berau.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Talisayan, Biduk-Biduk dan Pulau Derawan serta Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang dimana bawah lautnya memiliki panorama yang sangat indah, dan terdapat beberapa gugusan pulau sebagai habitat penyu yang merupakan tempat yang potensial untuk wisata bahari.

Wilayah Administrasi. Berdasarkan hasil pemekaran kecamatan tahun 2004, Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan, 95 desa dan 7 kelurahan. Terdapat penambahan 4 kecamatan dari tahun 2002, kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Tubaan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Maratua yang terbentuk dari pemecahan Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Biatan Lempake pemekaran dari Kec. Talisayan serta Kec. Batu Putih berasal dari pemekaran dari dua (2) Kec Talisayan dan Kec. Biduk-Biduk. Jumlah desa ditiap-tiap kecamatan beragam, berkisar dari 3 kelurahan untuk kecamatan Tanjung Redeb hingga 14 untuk kecamatan Kelay dan Taliyasan. Dilihat dari luas wilayah, kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Kelay, dengan luas wilayah 6.134,60 km² atau 23,35% dari luas Kabupaten Berau. Kecamatan lainnya yang cukup luas adalah kecamatan Segah yang mempunyai luas wilyah 5.166,40 km² dan kecamatan Biduk-Biduk 3.091,56 km². Sebaliknya kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit adalah kecamatan Tanjung Redeb yang mempunyai luas wilayah 23,76 km² atau 0,09% dari luas Kabupaten Berau. Jumlah desa dan luas wilayah di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1. dan tabel 2.2.

Tabel 2.1.
Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa

Kecamatan	Ibukota	Desa (Kelurahan)
Kelay	Muara Lesan	14
Talisayan	Talisayan	17
Tubaan	Tubaan	9
Biduk-Biduk	Biduk-Biduk	10
Pulau Derawan	Tanjung Batu	4
Maratua	Teluk Harapan	4
Sambaliung	Sambaliung	14
Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	3
Gunung Tabur	Gunung Tabur	11
Segah	Tepian Buah	10
Teluk Bayur	Teluk Bayur	6
Biatan Lempake	Lempake	5
Batu putih	Batu Putih	6

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Hampir semua kecamatan memiliki prasarana transportasi darat memadai, namun demikian hingga saat ini belum teroptimalkan secara maksimal. Hanya 2 kecamatan yaitu kecamatan Pulau Dermawan dan kecamatan Maratua yang dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi air.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jarak (Km)	Transportasi yang digunakan
Kelay	6.134,60	125	Darat
Talisayan	3.425,77	150	Darat
Tubaan	2.977,42	91	Darat
Biduk-Biduk	3.853,91	254	Darat
Pulau Derawan	3.858,56	112	Darat
Maratua	4.119,54	65	Air
Sambaliung	2.404,32	2	Darat
Tanjung Redeb	23,76	0	Darat
Gunung Tabur	1.987,02	11,6	Darat
Segah	5.166,40	86	Darat
Teluk Bayur	175,70	10	Darat
Biatan Lempake	9521,1*	90*	Darat
Batu Putih	5811,4*	200*	Darat

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

*angka Sementara

Iklm. Sebagai daerah tropis yang dekat dengan garis Khatulistiwa daerah ini memiliki curah hujan yang tinggi dengan hari hujan merata sepanjang tahun. Suhu udara di daerah ini sangat tinggi dengan tingkat penyinaran matahari yang banyak sepanjang tahun.

Curah hujan cenderung merata sepanjang tahun, berkisar antara 100 - 300 mm perbulan. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan November sebanyak 56,3 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada Bulan Desember sebesar 343,8 mm. Sedangkan hari hujan cenderung merata sepanjang tahun berkisar antara 13 sampai 25 hari tiap bulannya. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 26 sampai dengan 27 derajat celsius. Temperatur udara tertinggi terjadi pada Bulan Mei 33,6⁰ C, sedangkan suhu terendah terjadi pada Bulan Januari 22,1⁰ C. Kelembaban udara di Kabupaten Berau selama tahun 2003 berkisar antara 80-89% perbulannya. Sedangkan lama penyinaran matahari antara 21 sampai 66 setiap bulannya.

2.2. Ekonomi

Krisis Ekonomi. Krisis ekonomi tahun 1997 telah menimbulkan pengaruh yang besar terhadap berbagai upaya pembangunan yang dilakukan. Pembangunan menjadi terhambat dan sasaran pembangunan daerah tidak tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebelum krisis ekonomi ternyata semu dengan struktur ekonomi daerah yang kurang sehat. Perkonomian daerah selama ini belum didorong oleh peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi dan modal intensif.

Krisis ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 19,3 % per tahun, mengalami kontraksi menjadi - 0,65 % pada saat krisis. Walaupun tidak separah daerah industri lainnya, krisis tersebut mengakibatkan bangkrutnya beberapa perusahaan dan terjadinya pengangguran. Jumlah pengangguran 2769 orang pada tahun 1996 meningkat menjadi 5450 orang pada 1998.

Ekonomi Daerah. Kondisi ekonomi nasional yang membaik secara langsung berdampak pada perekonomian Kabupaten Berau. Kebijakan desentralisasi pemerintah pusat melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ikut

memacu pergerakan ekonomi daerah menuju kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. PDRB Kabupaten Berau selama periode 2003-2004 memperlihatkan kenaikan, dari nilai PDRB sebesar Rp. 3.062.875,22 juta pada tahun 2003 menjadi Rp. 3.385.579,63 juta pada tahun 2004. Sedangkan berdasarkan harga konstan 1993 hanya mengalami sedikit peningkatan, dari Rp 821.690,22 juta pada tahun 2003 menjadi Rp. 872.398,22 juta pada tahun 2004 (Tabel 2.3). Kenaikan harga barang yang terus bertambah menyebabkan pertambahan pada harga berlaku lebih besar dari pada harga konstan.

Dilihat dari sudut kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Berau, pada tahun 2004 sektor pertambangan memberikan sumbangan terbesar yaitu 36,89%, diikuti sektor pertanian sebesar 20,85%, industri pengolahan 14,21% dan perdagangan, hotel dan restoran 13,23%. Sektor yang paling kecil sharenya adalah sektor listrik dan air sebesar 0,16% dari total PDRB dan keuangan dan jasa perusahaan 0,66%. Berdasarkan harga konstan sektor dominan di Kabupaten Berau adalah sektor pertambangan sebesar 23,28%, pertanian sebesar 19,89%, perdagangan, hotel dan restoran 18,90% industri pengolahan 14,70%. Sektor listrik dan air menempati kontribusi terkecil yaitu 0,18%, dan keuangan dan jasa perusahaan 1,02% dari total PDRB (Tabel 2.4).

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2002-2004 menunjukkan kenaikan yang signifikan seperti dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB (Tabel 2.5). Berdasarkan harga konstan pertumbuhan PDRB pada tahun 2002 sebesar 9,11% menurun menjadi 6,17% pada tahun 2003. Sehingga secara umum, terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah nilai pendapatan perkapita. Dengan jumlah penduduk 146.451 jiwa pada tahun 2004, maka pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku Rp 17.338.108 dan pada harga konstan Rp 3.516.733

Tabel 2.3.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha Industrial Origin	Tahun/Year			
	1993	2002	2003	2004*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	138.214,68	161.562,80	167.685,75	173.512,42
2. Pertambangan dan Penggalian Mining & Quarrying	3.582,02	160.571,46	181.469,30	203.089,70
3. Industri Pengolahan Manufacturing Industries	6.939,25	119.435,56	123.518,28	128.245,87
4. Listrik dan Air Bersih Electricity and Water Supply	396,01	1.537,90	1.572,87	1.611,43
5. Bangunan	16.794,79	17.265,14	18.662,93	19.420,70
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran Trade, Hotel and Restaurant	80.351,35	143.407,04	155.928,01	164.859,77
7. Pengangkutan dan Komunikasi Transportation and Communication	17.314,86	107.071,15	110.961,23	116.009,97
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan Financial and Business Service	4.318,03	8.190,62	8.522,54	8.859,17
9. Jasa-Jasa/ Services	10.545,57	49.218,86	53.339,29	56.789,18
Jumlah PDRB/ Total GDRP	278.456,56	768.260,53	821.690,20	872.398,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

* : Angka Sementara

Tabel 2.4.
Distribusi Prosentase Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 1993

Lapangan Usaha Industrial Origin	Tahun/Year			
	1993	2002	2003	2004*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian Agriculture	37,48	21,03	20,41	19,89
2. Pertambangan dan Penggalian Mining & Quarrying	3,56	20,90	22,08	23,28
3. Industri Pengolahan Manufacturing Industries	2,53	15,55	15,03	14,70
4. Listrik dan Air Bersih Electricity and Water Supply	0,18	0,20	0,19	0,18
5. Bangunan Construction	6,20	2,25	2,27	2,23
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran Trade, Hotel and Restaurant	38,14	18,67	18,98	18,90
7. Pengangkutan dan Komunikasi Transportation and Communication	6,80	13,94	13,50	13,30
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan Financial and Business Service	1,55	1,07	1,04	1,02
9. Jasa-Jasa/ Services	3,56	6,41	6,49	6,51
Jumlah PDRB/Total GDRP	100,00	100,00	10,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

* : Angka Sementara

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (%)

Lapangan Usaha Industrial Origin	Tahun/Year			
	1993	2002	2003	2004*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian Agriculture	-	2,75	3,79	3,47
2. Pertambangan dan Penggalian Mining & Quarrying	-	21,94	13,01	11,91
3. Industri Pengolahan Manufacturing Industries	-	1,33	3,42	3,83
4. Listrik dan Air Bersih Electricity and Water Supply	-	5,40	2,27	2,45
5. Bangunan Construction	-	6,39	8,10	4,06
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran Trade, Hotel and Restaurant	-	7,81	8,73	5,73
7. Pengangkutan dan Komunikasi Transportation and Communication	-	7,02	3,63	4,55
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan Financial and Business Service	-	7,54	4,42	3,59
9. Jasa-Jasa Services	-	26,23	8,37	6,47
Jumlah PDRB/Total GDRP	-	9,11	6,95	6,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

* *Angka Sementara*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi meningkatkan Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Berau. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah secara langsung berimbas terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat. Target penerimaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 01 tahun 2004 sebesar Rp. 464,62 milyar, setelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 menjadi Rp. 502,84 milyar. Apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2003 sebesar Rp. 552,72 milyar rupiah, berarti target penerimaan menurun sebesar Rp. 51,43 milyar rupiah atau 9,31 % namun jauh lebih tinggi bila dibandingkan target penerimaan pada tahun 2001 Rp. 344,35 milyar. Menurunnya target penerimaan APBD tahun 2004, antara lain disebabkan oleh : (1) sebagian dana perimbangan dan dana subsidi dari pemerintah tersebut dialokasikan untuk

pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004; (2) terjadinya penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap jasa giro penyimpanan dana pada Bank Pemerintah, dengan dihentikannya pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Pemerintah Kabupaten Berau, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan yang bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga; (3) Belum adanya informasi target penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK-DR), pada saat penyampaian Nota Keuangan tahun 2004; dan (4) menurunnya nilai tukar rupiah tersebut berpengaruh terhadap dana penerimaan hasil Minyak Bumi dan Gas bagi Pemerintah Kabupaten / Kota.

Target penerimaan pada tahun 2005 diperkirakan sebesar 514,11 milyar rupiah lebih. Memperhatikan target penerimaan selama kurun waktu lima tahun dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan senantiasa berpegang kepada estimasi potensi sumber-sumber penerimaan yang dimungkinkan untuk memenuhi target dimaksud, dengan senantiasa menganut prinsip kehati-hatian dan berimbang. Pada tahun 2004, secara umum target pendapatan daerah yang mengalami penurunan yaitu: pada pos Bagian Pendapatan Asli Daerah dari 21,40 milyar rupiah pada tahun 2003, menjadi hanya 18,12 milyar rupiah atau menurun sebesar 3,28 milyar rupiah. Penerimaan bagian ini hampir seluruhnya mengalami penurunan, kecuali bagian laba usaha daerah meningkat sebesar 900 juta rupiah, meskipun sampai akhir tahun anggaran 2004, laba dari BUMD, yang merupakan deviden atas penyertaan modal pada BPD Kaltim belum terealisasi. Demikian juga pada tahun anggaran 2005 ini, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar 21,74 milyar rupiah lebih. Penerimaan pendapatan yang berasal dari pemerintah atasan juga mengalami penurunan dari 397,18 milyar rupiah menjadi 367,90 milyar rupiah turun 29,20 milyar rupiah atau 7,37%.

Meskipun terjadi penurunan target, akan tetapi realisasi penerimaan sebenarnya meningkat. Peningkatan penerimaan APBD Kabupaten Berau selama 4 tahun terakhir dibidang pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau dapat dipenuhi melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan pencairannya. Selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2001-2004, realisasi penerimaan melebihi yang ditargetkan yaitu antara 4,73% sampai 14,00%. Pada tahun 2001 dari target 344,35

milyar rupiah dapat direalisasikan sebesar 360,64 milyar rupiah, meningkat sebesar 16,29 milyar rupiah atau 4,73%. Tahun 2002 target penerimaan sebesar 440,65 milyar rupiah, sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya sebesar 505,11 milyar rupiah berarti meningkat sebesar 64,46 milyar rupiah atau 14,00%. Tahun 2003, target penerimaan ditetapkan sebesar 552,72 milyar rupiah, dan dapat direalisasikan sebesar 605,88 milyar rupiah atau 9,62% melebihi dari yang ditargetkan. Tahun 2004, target penerimaan sebesar 502,84 milyar rupiah, dan realisasinya mencapai 554,98 milyar rupiah. Dengan demikian melampaui target sebesar 52,14 milyar atau 10,37%. Dari anggaran sebesar 502,84 milyar tersebut dialokasikan untuk belanja aparatur sebesar 191,68 milyar rupiah atau 38,12%, sedangkan alokasi belanja publik sebesar 264,16 milyar rupiah atau 52,53%. Alokasi 52,53% tersebut belum termasuk belanja publik non kegiatan sebesar 46,99 milyar rupiah. Dengan demikian total belanja publik tahun 2004 sebesar 311,15 milyar rupiah atau 61,88% dari keseluruhan APBD tahun 2004.

Pertanian. Pertanian merupakan mata pencaharian dari sebagian besar masyarakat daerah ini. Sebagai daerah dengan luas wilayah 34.127 km² dengan topografi lahan yang khas, curah hujan merata sepanjang tahun 100-300 mm, menyebabkan pertanian dapat berkembang dengan baik di daerah ini. Kabupaten Berau memiliki lahan potensial pertanian untuk tanaman padi, yang terdiri dari lahan sawah seluas 8.609 ha dan lahan kering 2.189.411 ha. Perkembangan luas panen dan produksi padi sawah di Kabupaten Berau pada tahun 2004 tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Secara riil luas panen padi meningkat dari 3.032 ha pada tahun 2003 menjadi 3.102 ha pada tahun 2004 atau sebesar 0,3 %. Karena tidak bertambahnya luas panen dan meningkatnya produksi padi per hektar maka produksi padi juga tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dari 9.815 ton pada tahun 2003 menjadi 10.054 ton pada tahun 2004, atau meningkat sebesar 0,5 %. Hal ini tidak berlaku atau terjadi pada padi ladang, luas panen padi ladang meningkat dari 6.375 ha tahun 2003 menjadi 7.610 ha pada tahun 2004. Sedangkan produktifitas per hektar mengalami penambahan berarti. Produksi padi ladang meningkat seiring dengan penambahan luas panen dari 13.889 ton pada tahun lalu menjadi 17.147 ton. Kecamatan yang memiliki luas panen dan produksi padi (sawah dan ladang) terbesar adalah Kecamatan Sambaliung yaitu

dengan luas panen 2.179 ha sehingga produksi padi yang dicapai sebesar 6.023 ton dalam tahun 2004. Ini berarti lebih dari 35,12% produksi padi di Kabupaten Berau dihasilkan oleh Kecamatan Sambaliung. Di tempat kedua adalah kecamatan Talisayan yang memberikan kontribusi produksi padi 5.283 ton (30,8%) dari total produksi padi Kabupaten Berau.

Kemandirian Beras. Dengan asumsi konsumsi per kapita pertahun 113 kg, maka kebutuhan beras Kabupaten Berau pada tahun 2004 mencapai 16.548,96 ton. Ini berarti produksi padi lokal mengalami surplus sebesar 3,6% dari total kebutuhan beras daerah. Walaupun tingkat suplai daerah tinggi tapi rentan, karena lebih banyak dipasok dari usaha padi ladang yang sangat fluktuatif. Program pengembangan KSP Salita belum berjalan optimal.

Tanaman palawija di Kabupaten Berau antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Selama periode 1996-2003 tanaman ini mengalami fluktuasi baik luas panen maupun produksinya. Namun dalam kurun waktu dua tahun berikutnya (2002 dan 2004) hampir seluruh jenis komoditi palawija tersebut mengalami penurunan luas panen. Pada jenis tanaman sayur-sayuran perkembangannya sangat berfluktuasi, sebagian besar mengalami kenaikan baik luas panen maupun produksinya. Jenis tanaman sayuran yang terbanyak dihasilkan di Kabupaten Berau adalah kacang panjang dan ketimun, produksinya mencapai 11.268 ton dan 8.324 ton pada tahun 2004. Produksi ini jauh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Padahal luas panen dari komoditi ini mengalami penurunan. Komoditas jagung dan kedelai potensi dikembangkan dilihat dari potensi lahan dan tingkat produktifitas yang tinggi melampaui rata-rata provinsi dan sebagai bahan baku industri. Secara umum tanaman palawija diusahakan secara sambilan, dengan skala usaha yang kecil dan terfragmentasi.

Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Berau antara lain: kelapa, kopi, lada, cengkeh, coklat, kelapa sawit dan lainnya yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Luas tanaman perkebunan kelapa tahun 2003 mencapai 8.695 hektar dengan produksi sebesar 12.390 ton. Perkebunan karet dengan luas 754 ha, namun jenis tanaman perkebunan ini baru

tiga tahun berproduksi pada tahun 2004 produksinya 45 ton. Tanaman kopi dengan luas tanam 2.240 ha dengan produksi 590 ton dalam tahun 2004. Tanaman perkebunan lainnya yaitu cengkeh dengan luas 50 ha dan produksi 2,10 ton, tanaman kakao cukup luas di daerah ini dimana luasnya mencapai 5.900 ha dan produksinya mencapai 3.950 ton. Komoditas kelapa, kakao dan lada merupakan komoditas komersial yang berpeluang besar untuk dikembangkan ke depan. Selama ini pengusahaannya dilakukan secara sambilan menyebabkan tingkat produktivitas rendah. Selain itu, tingkat adaptasi terhadap teknologi juga masih sulit, minimnya akses terhadap permodalan dan pasar. Penanganan panen dan pasca panen yang asalan menyebabkan nilai tukar produk yang diperoleh petani rendah dan daerah tidak mendapat nilai tambah. Perilaku moral hazard pengusaha perkebunan, tuntutan masyarakat sekitar perkebunan dan tuntutan mutu akan menjadi persoalan dan sekaligus tantangan ke depan.

Sampai akhir tahun 2004, populasi ternak besar yang terbesar jumlahnya di Kabupaten Berau adalah sapi yaitu 6.499 ekor atau 48,65% dari seluruh jumlah ternak yang terdiri dari 5 jenis ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, kuda dan babi. Banyaknya ternak yang masuk sebesar 1.457 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing, sedangkan ternak yang dipotong berjumlah 2.567 ekor dari 4 jenis ternak yaitu sapi, kerbau, babi dan kambing. Pemotongan hewan ternak untuk konsumsi bisa dilakukan di rumah potong hewan dan di luar rumah potong hewan. Masih tingginya (43 %) pasokan sapi dan kambing dari luar daerah, mencerminkan tingginya ketergantungan daerah ini terhadap pasokan dari luar. Pasar lokal yang terbuka dan kebutuhan kalimantan Timur yang mencapai 45.000 ekor sapi potong dan daging per tahun adalah peluang pasar yang besar. Untuk jenis unggas, pada akhir tahun 2003 menunjukkan populasi sebesar 204.364 ekor dari empat Jenis unggas yang dibudidayakan (ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik), dan yang terbanyak adalah ayam bukan ras sebesar 120.655 ekor, ayam ras petelur dan pedaging berjumlah 67.600 ekor dan 8.200 ekor. produksi daging dan telur yang dihasilkan dari keempat jenis unggas tersebut masing-masing ayam buras dan ras 5.425,5 ton, dan itik 3.134 ton. Sementara itu produksi telur yang dihasilkan 106.815 butir (setara 6.800 kg) dari ayam ras, ayam kampung dan itik.

Perikanan. Peningkatan produksi perikanan dilakukan melalui usaha budidaya dan penangkapan ikan baik di darat maupun laut. Pada tahun 2004 luas areal pengembangan budidaya laut dari areal 40,6 ha mampu menghasilkan produksi 46,2 ton dengan nilai Rp. 6.105.000.000 atau 64,44% dari total nilai produksi perikanan. Sementara luas areal usaha tambak 3.100 ha mampu menghasilkan produksi 134,7 ton dengan nilai Rp. 2.810.600 (29,650%) dari nilai produksi, keramba hanya mampu menyumbang Rp 405.600.000,- (4,77%) dan kolam Rp 157.200.000,- (1,65%) dari total nilai produksi perikanan. Usaha budidaya dan penangkapan di laut memiliki peluang, karena adanya hak pengelolaan zona tambahan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) samapi dengan 200 mil dari laut.

Hutan. Kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang eksisting yang sudah ditetapkan seluas 79.007,71 Ha yang terdiri atas: Kawasan Lindung Tabalar (14.751,34 ha), Hutan Lindung Gunung Nyapa (9.502 ha), Kawasan Lindung Gunung Kundas (26.504,25 ha), Kawasan Lindung Sungai Dumaring (12.113,32 ha), Kawasan Lindung (Daerah Tangkapan Air) Suaran (4.136,8 ha) dan hutan penelitian (12.000 Ha). Dan daerah tangkapan air tersebut senantiasa diperkaya dengan tanaman unggulan setempat, jika dikembangkan sangat memungkinkan dijadikan daerah wisata yang mewakili hutan alam Berau. Upaya pengelolaan dan pemantapan fungsi kawasan lindung tersebut perlu mendapat prioritas. Persoalan pengawasan dan pengamanan kawasan lindung dari dampak negatif pengembangan kawasan belum dilaksanakan secara optimal oleh pihak terkait.

Pertambangan. Potensi bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Berau meliputi: Batu Bara, dengan cadangan volume batu-bara 437 juta ton, Bahan Galian B (emas), dan Bahan Galian C (Tanah liat, Batu Kapur,dll). Sejauh ini belum ada evaluasi eksplorasi bahan tambang terhadap keseimbangan alam, seperti dalam kawasan resapan air dan perlindungan flora dan fauna. Explorasi bahan tambang yang berada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan, semakin medekat ke pusat permukiman. Pemulihan lahan melalui kegiatan reklamasi yang berwawasan lingkungan setelah eksploitasi yang menjadi kewajiban perusahaan tambang batu bara belum efektif.

Pariwisata. Pembangunan pada sektor pariwisata, lebih diarahkan pada persiapan untuk menjadi sektor andalan yang mampu menunjang penggalakan pembangunan ekonomi bersama sektor lainnya yang terkait. Dalam rangka persiapan sektor pariwisata sebagai sektor andalan, telah dilakukan berbagai prinsip kebijaksanaan secara terarah, terencana dan terkendali melalui pembangunan tata ruang kawasan, maupun pengembangan standarisasi produk. Demikian pula sektor pariwisata dan partisipasi masyarakat luas terhadap kepariwisataan daerah ditingkatkan melalui upaya peningkatan produk, strategi pemasaran, pengembangan investasi dan pengembangan aksesibilitas serta infrastruktur. Pemerintahan Kabupaten Berau telah memiliki Dinas Pariwisata berdasarkan SK Bupati Kabupaten Berau No. 201 tanggal 4 Agustus 1999.

Dari berbagai kebijakan tersebut, dari pembangunan pada sektor pariwisata selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini periode 200-2002 telah banyak kemajuan. Pada tahun 2000 jumlah pengunjung 22593 orang terdiri dari turis asing 1033 orang dan turis domestik 21560, tahun 2001 jumlah pengunjung 25391 orang yang terdiri atas turis asing 2601 dan turis domestik 22790, tahun 2002 jumlah pengunjung meningkat menjadi 45253 orang terdiri dari turis asing 14444 dan domestik 43809 orang. Dan pada tahun 2003 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dengan penurunan angka kunjungan menjadi 28559 orang yang terdiri dari turis asing 511 dan domestik 14320. Penurunan ini dikarenakan terjadinya akibat dari kurang amannya Indonesia dari isu teror bom dan keamanan perbatasan (Ambalat). Oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah berupaya mengalihkan promosi wisatawan ke bulungan, kutai Timur dan Balikpapan serta tarakan dengan membuka obyek wisata lain seperti menyusuri sunagi pedalaman. Tracklingn dan wisata penelitian, memang diakui potensi wisata Kabuapten Berau selain potensi wisata bahari kita memiliki potensi wisata menelusuri sungai segah, segah Kelay dan sungai siduung. Keseniaan dan budaya pesisir dan pedalaman seperti tarian-tarian daerah, pengobatan tradisional serta musik serta juga memiliki Meseum

Tabel 2.7.
Jumlah Wisatawan ke Kabupaten Berau

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	
	Mancanegara	Domestik
2000	1.033	21.560
2001	2.601	22.720
2002	1.444	43.808
2003	933	27.626
2004	511	14.320
Jumlah	6.522	130.034

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Berau

Kegiatan usaha pariwisata yang sudah ada di Kabupaten Berau sebagian besar diselenggarakan oleh perusahaan swasta yang mengelola Objek Wisata Bahari di Pulau Derawan dan Perusahaan PT Borneo Eeo Land and Sea (BELS), perusahaan Malaysia sesuai dengan MoU tahun 2001 antara Pemerintah Kabuapten Berau dengan PT BELS. Untuk mendukung pelayanan terhadap wisatawan dalam negeri maupun mancanegara di daerah ini telah tersedia akomodasi seperti hotel, penginapan dan cottage baik yang berlokasi di Tanjung Redeb maupun di kecamatan-kecamatan. Jumlah hotel yang ada berjumlah 37 buah masing-masing 28 Buah di Tanjung Redeb, 8 Buah di Kecamatan Kepulauan Derawan dan 1 buah dikecamatan Biduk-biduk.

Penetapan Kawasan Khusus Taman Wisata Pulau Kakaban belum disertai secara maksimal dengan *low enforment* khususnya terkait dengan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan daerah. Kepulauan Derawan, Kepulauan Sangalaki dan Kakaban sebagai kawasan unik dan mempesona belum diantisipasi dengan peraturan dan pengawasan terutama dengan permasalahan pendatang dan pembangunan sarana dan prasarana yang rawan akan mengabaikan daya dukung lingkungan.

Walaupun keunikan yang dimiliki Berau merupakan daya tarik yang sangat tinggi, namun promosi yang dilakukan daerah masih perlu ditingkat lebih maksimal baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.

Industri. Diera globalisasi sekarang ini, setiap pelaku ekonomi harus meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang bersaing.

Industri yang dominan di Kabupaten Berau adalah industri hasil hutan, industri kertas, industri rumah tangga. Di Kabupaten Berau belum berkembang Industri Aneka (IA) dan Industri Loham Mesin Kimia (ILMK). Kabupaten Berau dengan dengan letak geografis yang strategis sangat terbuka menjadi sentra industri di utara Kalimantan Timur bahkan Indonesia Timur.

Industri yang belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan belum kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi, diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor juga disebabkan karena lemahnya daya saing nasional terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi. Lemahnya daya saing tersebut, juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh cukup kuat adalah terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distribusi. Perkonomian daerah, basis kekuatannya masih banyak mengandalkan murahnya upah tenaga kerja dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan.

Perdagangan. Peningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Berau serta semakin meningkatnya pertumbuhan berbagai sektor ekonomi akan mendorong perkembangan sektor lainnya. Sektor yang berkembang seiring dengan peningkatan tersebut adalah sektor perdagangan. Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan pula daya beli masyarakat, sehingga sektor perdagangan semakin memegang peranan yang penting. Sumber daya alam yang berlimpah di daerah ini memungkinkan sektor perdagangan semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dari besarnya jumlah perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan. Secara keseluruhan perusahaan perdagangan yang melakukan usahanya di daerah ini pada tahun 2003 sebanyak 1.714 perusahaan berbadan hukum, mengalami peningkatan sebesar 1515 perusahaan (860 %) dibandingkan pada tahun 2002 sebanyak 199 Perusahaan. Dari 1.714 perusahaan, 115 (8,2 %) perusahaan

berbentuk PT, 654 (38 %) CV, 65 (4 %) Koperasi dan 880 (51 %) perusahaan perorangan.

Salah satu jenis perdagangan utama yang berkembang pesat adalah perdagangan bahan pokok dan bahan penting lainnya. Beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Berau merupakan salah satu komoditi yang dominan, sebanyak 21.527.400 Kg dapat disediakan oleh berbagai perusahaan baik swasta maupun negara dan 18.18.079.500 Kg disalurkan kepada seluruh masyarakat. Selain itu barang lain yang disediakan serta dijual oleh berbagai perusahaan tersebut adalah gula pasir, tepung, pupuk, kain dan yang lainnya.

Perdagangan antar daerah mutlak diperlukan karena banyak bahan-bahan keprerluan masyarakat yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat. Kabupaten Berau dengan posisi geografis yang strategis di wilayah utara Kalimantan terbuka menjadi pusat distribusi dan perdagangan.

Perdagangan luar negeri selama periode 1999-2003 mengalami kemajuan yang cukup baik. Dari tahun ke tahun kegiatan ekspor dan import melalui pelabuhan Tanjung Redeb terus berkembang. Ekspor dari daerah ini meliputi berbagai komoditi diantaranya kayu bulat (log), batu bara, pulp dan lainnya. Sedangkan daerah ini mengimport komoditi-komoditi seperti wood chip, bahan kimia, garam, kayu akasia dan berbagai komoditi lainnya. Ekspor terbesar adalah batu bara sebanyak 6.159.102 metrik ton pada tahun 2004 dengan tujuan dominan kenegara Jepang.

Koperasi. Jumlah koperasi di Kabupaten Berau pada tahun 2003 sebanyak 360 unit dengan anggota 15.703 orang dengan modal usaha sebesar Rp. 3.441.000.000 dan Sisa Hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 342.000.000. Koperasi sebagai usaha ekonomi rakyat masih sering diwarnai dengan persoalan keterbatasan modal, pengelolaan dan manajemen yang kurang profesional dalam melakukan pengembangan usaha kedepan.

Investasi. Pemerintah daerah telah berupaya menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik calon investor agar berminat menanamkan modalnya di Kabupaten

Berau. Dengan pembangunan sarana dan prasarana, serta proses perizinan yang jelas dan cepat ternyata mampu meningkatkan minat investor. Indikator perekonomian juga dapat dilihat dari perkembangan investasi, nilai investasi dari Sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah disetujui oleh Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) Kalimantan Timur pada tahun 2004, untuk wilayah Kabupaten Berau sebesar 15,32 triliun rupiah lebih. Sementara itu, Investasi PMDN tahun 2003, sebesar 3,90 triliun rupiah, hal itu berarti terjadi peningkatan sebesar 11,42 triliun atau 392,82%.

Khusus investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui oleh Badan Promosi dan Investasi Daerah Kalimantan Timur di daerah ini, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2003. Investasi PMA tahun 2003 sebesar 2,20 juta US dollar, sementara investasi PMA tahun 2004 hanya sebesar 1,24 juta US dollar lebih, atau menurun 0,96 juta US dollar.

Penurunan ini harus diakui terkait dengan situasi dan kondisi pra dan pasca pelaksanaan pemilihan umum di negara kita. Dari seluruh investasi yang telah disetujui tersebut, kesemuanya belum terealisasi, kecuali satu yang terealisasi pada tahun 2003, yaitu investasi PMDN atas nama PT. Telen Papan Agung yang bergerak pada industri kayu, dengan nilai investasi sebesar 700 ribu US dolar.

Jenis investasi yang diminati kebanyakan di sektor primer seperti perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Dampak dari berdirinya sejumlah industri, telah mendorong tumbuhnya usaha sektor perdagangan, konstruksi dan jasa perhotelan, pengangkutan dan jasa lainnya. Sistem investasi di Kabupaten Berau masih diwarnai dengan persoalan keengganan investor menanamkan modalnya, karena adanya proses perizinan yang berbelit-belit dengan biaya proses yang kadang mahal.

Perbankan. Sektor perbankan sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan daerah. Pada tahun 1999, jumlah perbankan sebanyak 4 unit, kini pada tahun 2003 meningkat tajam menjadi 7 unit. Data Pengimpunan dana masyarakat terdiri dari atas dari simpanan giro sebesar 1,92 T, simpanan berjangka panjang sebesar 901 M dan tabungan sebesar 3,08 T, sehingga total keseluruhan adalah sebesar 5,9 T

Tenaga Kerja. Kabupaten Berau dengan jumlah penduduk 136.628 jiwa, memiliki angkatan kerja 63.942 pada tahun 2004 Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang secara aktif melakukan aktivitas ekonomi. Angkatan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya, sejalan dengan penambahan penduduk. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 93,5 % merupakan golongan penduduk yang bekerja dan sisanya 4981 orang atau 7,2 % merupakan golongan penduduk yang mencari pekerjaan.

Dilihat dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 35.116 jiwa (55,21 %) dari total angkatan kerja 63.942 jiwa. Sektor perdagangan mampu menyerap tenaga kerja 7.159 jiwa (11,15%), jasa 4.606 jiwa (7,60%), dan industri 4.781 jiwa (7,43%)

Kawasan Pesisir. Di masa lalu, kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapat prioritas penanganan, sehingga potensi ekonomi kawasan pesisir terabaikan dan belum terkelola secara baik. Upaya peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan pendekatan yang cenderung mengabaikan penataan ruang dan kesesuaian terhadap daya dukung lingkungan. Program pengembangan kawasan pesisir belum berhasil membebaskan masyarakat pesisir dari jeratan utang para rentenir. Selain itu, masalah pencurian ikan oleh kapal asing, kurangnya perlindungan dari perampokan juga masih mewarnai.

Daerah tertinggal. Ketertinggalan daerah mencerminkan terjadinya kesenjangan dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Daerah tertinggal tersebar di daerah pedalaman seperti di kecamatan Segah dan Kelay, di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketertinggalan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi lamban dan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat.

2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Indeks Pembangunan Manusia yang diperkenalkan oleh United Nation Development Program (UNDP) sejak tahun 1990 adalah untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu Negara dalam bidang pembangunan manusia. IPM dapat digunakan sebagai kinerja suatu Negara, propinsi atau kabupaten/kota dalam bidang yang

sama selama kurun waktu tertentu dengan menggunakan beberapa indicator antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, melek huruf dan lain-lain.

Pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan di Berau, di mana prioritas ini menjadi penting mengingat beberapa hal, antara lain: (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin langka, disamping *competitive advantage* tidak lagi ditentukan pada keberadaan SDA; (2) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki karena tidak didukung oleh ketrampilan yang memadai; (3) perkembangan dan perubahan lingkungan global yang cepat dengan kompleksitas yang tinggi sehingga menuntut produktivitas yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi; (4) adanya paradigma desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan peluang berupa bargaining position dalam peningkatan kualitas SDM.

Pendidikan. Program penuntasan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi pada tingkat dasar dengan sasaran tertuntaskannya pendidikan murid yang belum tamat SMP/MTs, agar dapat melanjutkan sekolah melalui kegiatan-kegiatan terprogram, program wajib belajar SD dan SMP, penyediaan buku pelajaran pokok SD dan SMP, pemberian beasiswa, peningkatan mutu SMP dan pengembangan program ketrampilan. Program peningkatan mutu TK/SLB, SD dan SMP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan SD dan SMP agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Program penunjang SD dan SMP yang bertujuan melengkapi kebutuhan penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan pendataan SIM SD/MI, pembinaan seni-budaya daerah, pembinaan PLS dan pembinaan olah raga.

Program pengembangan dan peningkatan mutu sekolah kejuruan yang bertujuan menyiapkan anak didik agar memiliki pendidikan dan ketrampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan setempat dan pasar kerja.

Peningkatan mutu pendidikan jenjang SLTA yang bertujuan meningkatkan kualitas lulusan yang berkompetisi memasuki perguruan tinggi berkualitas. Program pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Program pengembangan pendidikan tinggi yang berorientasi pada potensi daerah yang bertujuan mendorong berkembangnya perguruan tinggi/fakultas/jurusan yang bertujuan menghasilkan lulusan yang handal yang menguasai ipteks berbasis imtak. Program bantuan beasiswa putra/putri Berau yang berprestasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan bagi putra/putri Berau yang berprestasi agar semakin mampu meningkatkan pendidikannya sesuai bakat/minat yang dimiliki, baik di dalam maupun luar negeri. Program pengembangan sekolah unggulan yang bertujuan menjangkau dan mengembangkan lulusan yang berbakat bagi pengembangan dan penguasaan ipteks yang diabdikan untuk membangun Berau. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) baik di jenjang SD, SMP, dan SLA. Upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Berau dilakukan dengan melihat berbagai kenyataan di lapangan khususnya rasio sekolah terhadap murid dan guru. Periksa table-table di bawah:

Tabel 2.11.
APK dan APM di Kabupaten Berau Tahun 2005

Tahun	APK			APM		
	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
2005	116,05	75,20	45,13	94,36	55,88	29,92

Sumber: BPS Kabupaten Berau

Tabel 2.12
Rasio Murid Terhadap Guru di Sekolah

No.	Jenis Sekolah	Jumlah	Siswa	Guru	Rasio murid Terhadap Guru
1.	SMA	5	800	1061	8,3
2.	SMP / MTs	13	1514	158	9,6
3.	SD / MI	105	14867	1061	15

Sumber: Profil Pendidikan Kab.Berau Tahun 2005-2009.

Kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Berau dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilannya, yakni lingkungan sehat,

elayanan kesehatan, factor turunan dan perilaku sehat. Tingkat perkembangan aspek-aspek di atas sangat menentukan jumlah kematian dan kesehatan masyarakat. Di antara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena melalui pelayanan kesehatan ini tidak saja dapat dilakukan pelayanan kesehatan, tetapi juga upaya kesehatan yang mencakup lingkup yang sangat luas, termasuk informasi kesehatan.

Permasalahan yang muncul pada sektor kesehatan secara umum mencakup: (1) dana kesehatan yang terbatas, (2) terbatasnya dan rendahnya profesioanlisme tenaga medis dan paramedic, (3) rendahnya mutu layanan medis, (4) sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki sangat terbatas, (5) belum terpenuhinya mutu gizi masyarakat yang layak, (6) wilayah yang harus dilayani sangat luas sebarannya.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Meningkatnya pelayanan kesehatan berarti meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemeratakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ialah dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat di berbagai daerah di wilayah Berau.

Tabel 2.13.
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
di Kabupaten Berau

Tahun	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah
1996		62	62
2004	15	78	93

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Berau

Peningkatan jumlah Rumah Sakit, Puskesmas/Puskemas Pembantu belum diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang memadai.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk, Prasarana Kesehatan dan SDM Kesehatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit	Puskemas	Puskemas Pembantu	Dokter	Bidan	Perawat
1.	Kelay	4.165		1	4		4	12
2.	Talisayan	12.820		1	14	2	5	22
3.	Sambaliung	22.744		1	13	2	10	24
4.	Segah	5.409		1	3	1	3	12
5.	Tanjung Redeb	48.565	1	2	3	14	24	61
6.	Gunung Tabur	12.348		2	9	2	4	10
7.	Pulau Derawan	7.487		2	4	2	1	8
8.	Tubaan	6.680		1	6	1	3	9
9.	Biduk-Biduk	8.608		1	7	2	2	18
10.	Maratua	2.919		1	3		1	9
11.	Teluk Bayur	14.707		1	5	2	5	8
12	Biatan Lempake	2524*						
13	Batu Putih	4760*						

Sumber: Berau dalam Angka (2003)

*Angka sementara

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan, agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Dari hasil pengamatan terhadap sekelompok penduduk di Kabupaten Berau, masih banyak dari mereka yang belum memiliki kesadaran memadai untuk hidup sehat yang disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kesehatan.

Melalui berbagai upaya, diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan sama sekali penularan penyakit seperti TCD (Tiphus, Kolera, dan Disentri) serta penyakit-penyakit lain seperti penyakit kulit, demam berdarah, maupun malaria.

Indikator-indikator berkaitan dengan derajat kesehatan ialah angka kematian bayi, balita, dan maternal, dan umur harapan hidup. Angka kematian untuk bayi (IMR) pada tahun 2003 adalah 14,91 permil, sedangkan angka kematian balita (CMR) pada tahun yang sama ialah 0,57 permil. Kematian ibu maternal (MMR) yakni

0,91 permil. Status gizi dengan indikator prevalensi anemia gizi pada ibu hamil masih di bawah standar nasional yaitu baru mencapai 40 mg % dari Standar Nasional sebesar 45 mg % sedangkan angka CDR pada tahun 2003 mengalami penurunan 0,14 permil dari tahun 2002 yakni 6,08 permil. Untuk umur harapan hidup mengalami peningkatan yakni dari usia 65 menjadi 66 tahun pada 2003.

Program Pembangunan Kesehatan umumnya ditempuh dengan cara: (1) mengembangkan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, (2) meningkatkan layanan kesehatan, (3) perbaikan gizi masyarakat, (4) meningkatkan dan mengembangkan sumber daya kesehatan, (5) perlindungan masyarakat dari NAPZA, (6) penyusunan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan masyarakat.

2.4. Fisik dan Prasarana

Infrastruktur Dan Transportasi. Kabupaten Berau memiliki wilayah yang luas meliputi 34.127 km². Menyebarnya penduduk di desa-desa daerah pedalaman dan pesisir merupakan tuntutan Kabupaten ini membutuhkan sarana jalan yang memadai untuk menjangkau keseluruhan pelosok Berau karena panjang dan kualitas jalan menentukan lancarnya arus transportasi untuk menopang aktifitas ekonomi masyarakat. Berikut ini data statistik tentang kondisi jalan yang dimiliki Kabupaten Berau berdasarkan Berau Dalam Angka Tahun 2004 yang dipublikasikan oleh Kantor Statistik Kabupaten Berau.

Tabel 2.15.
Panjang Jalan Kabupaten dan Propinsi
Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Jalan Kelas (Km)

Perincian	Kabupaten	Propinsi	Jumlah
I. Jenis Permukaan			
1. Aspal	85,02	87,00	172,02
2. Kerikil	388,66	434,00	822,66
3. Tanah	448,00	115,00	563,00
4. Tidak diperinci	-	-	-
<i>Jumlah</i>	921,68	636,00	1.557,68
II. Kondisi Jalan			
1. Baik	732,83	160,00	892,83
2. Sedang	179,20	452,00	631,20
3. Rusak	9,65	24,00	33,65
4. Rusak berat	-	-	-
<i>Jumlah</i>	921,68	636,00	1.557,68
III. Kelas Jalan			
1. Kelas I	-	-	-
2. Kelas II	-	-	-
3. Kelas IIIA	-	-	-
4. Kelas IIIB	-	37,00	37,00
5. Kelas IIIC	431,93	123,00	554,93
6. Tidak diperinci	489,75	476,00	965,75
Jumlah			
2003	921,68	636,00	1.557,68
2002	921,68	636,00	1.557,68
2001	877,95	557,00	1.434,95
2000	877,95	557,00	1.434,95
1999	877,95	210,10	996,60

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Panjang jalan Kabupaten Berau tidak mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2002-2003, panjang jalan Kabupaten sepanjang 921,68 Km sedangkan jalan propinsi 636 Km sehingga total jalan yang melintasi daerah Kabupaten Berau adalah 1557,68.Km. Panjang jalan ini terbagi didasarkan jenis jalan dengan berbagai kondisi.

Selain panjang jalan sarana angkutan berupa kendaraan bermotor juga sangat menentukan pada meningkatnya laju mobilitas penduduk. Berikut ini data jumlah kendaraan bermotor menurut status dan jenisnya.

Tabel 2.16.
Kendaraan Bermotor Menurut Status dan Jenisnya

Jenis Kendaraan <i>Kind of Vehicles</i>	Tidak Umum <i>Non Public</i>		Umum <i>Public</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Negara <i>State</i>	Swasta <i>Private</i>	Negara <i>State</i>	Swasta <i>Private</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Mobil Penumpang/ <i>Passanger Car</i>	169	795	-	241	1.205
1. Sedan	8	3	-	-	11
2. Jeep	35	314	-	-	349
3. St.Wagon	126	478	-	241	845
II. Mobil Beban/ <i>Good Vehicles</i>	35	1.164	-	49	1.248
1. Truck Barang	2	649	-	49	700
2. Truck Derek	3	1	-	-	4
3. Truck Tangki	4	6	-	-	10
4. Truck Dam Api	7	1	-	-	8
5. Truck Tractor	-	-	-	-	-
6. Pick Up	3	500	-	-	503
7. Ambulance	16	-	-	-	16
8. Mobil Jenazah	-	3	-	-	3
9. Lain-lain	-	4	-	-	4
III. Mobil Bus/ <i>Busses</i>	3	15	-	19	37
1. Bus Biasa	2	10	-	18	30
2.. Minibus	1	5	-	1	7
IV. Sepeda Motor/ <i>Motor Cycles</i>	813	17.078	-	-	17.891
1. Sepeda Motor	809	16.532	-	-	17.341
2. Scooter	4	546	-	-	550
<i>Jumlah/Total</i>					
2004	1.020	19.052	-	309	20.381
2003	946	14.764	-	304	16.014
2002	903	1.265	-	269	12.437
2001	818	7.465	-	225	8.540
2000	818	7.465	-	225	8.540

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Secara keseluruhan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Polres Berau sebanyak 20.281 (2004) meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 16.014(2003). Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan ruas jalan yang akan menyebabkan tingginya angka kecelakaan. Jika pada tahun 2003

jumlah kecelakaan lalulintas sebanyak 49 kejadian maka pada tahun 2003 jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 47 kali dengan total kerugian 52,95 juta tidak termasuk korban meninggal sebanyak 32 orang dan korban luka-luka.

Perkembangan transportasi darat Kabupaten Berau meningkat pesat seiring berkembangnya ekonomi Berau sejak dimulainya era otonomi daerah. Berikut ini data statistik jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat pada terminal Tanjung Redeb.

Tabel 2.17.
Kendaraan dan Penumpang pada Terminal Tanjung Redeb

Bulan Month	Kendaraan/Vehicle		Penumpang/Passenger	
	Datang <i>Arrive</i>	Berangkat <i>Departure</i>	Datang <i>Arrive</i>	Berangkat <i>Departure</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari				
Februari	180	180	3.714	2.977
Maret	191	191	3.424	2.854
April	184	184	2.961	3.067
Mei	152	152	2.531	2.467
Juni	176	176	2.843	2.904
Juli	186	186	2.966	3.067
Agustus	233	233	4.065	4.801
September	177	177	3.009	2.882
Oktober	191	191	3.508	3.533
November	193	193	3.268	3.825
Desember	376	376	4.188	7.579
	164	163	3.162	3.106
<i>Jumlah/Total</i>				
2004	2.403	2.402	39.639	43.062
2003	2.036	2.035	41.255	36.816
2002	1.629	1.609	32.030	31.164
2001	654	635	10.905	11.539
2000	-	-	-	-

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Selain transportasi darat, Kabupaten Berau juga memerlukan transportasi laut karena adanya beberapa daerah yang terpisah dari pulau induk sehingga hanya dapat ditempuh dengan transportasi air. Selain itu, transportasi laut merupakan sarana transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat di sektor perdagangan dan industri karena adanya keterbatasan transportasi darat. Berikut adalah data statistik jumlah dan penumpang yang datang dan berangkat serta data

bongkar muat barang angkutan laut menurut jenis barang pada Pelabuhan Laut Tanjung Redeb.

Tabel 2.18.
Kapal dan Penumpang pada Pelabuhan Tanjung Redeb Dirinci Per Bulan

Bulan <i>Month</i>	Kapal/ <i>Ships</i>		Penumpang/ <i>Passenger</i>	
	Datang <i>Arrive</i>	Berangkat <i>Departure</i>	Datang <i>Arrive</i>	Berangkat <i>Departure</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	215	225	2.331	2.266
Februari	212	190	1.868	1.873
Maret	213	235	1.752	1.548
April	222	219	1.494	1.396
Mei	220	226	1.793	1.855
Juni	204	208	1.594	1.460
Juli	199	208	1.694	1.513
Agustus	210	183	849	711
September	206	215	779	942
Oktober	205	224	1.001	1.125
November	179	185	1.798	1.621
Desember	214	202	1.125	923
<i>Jumlah/Total</i>				
2004	2.499	2.520	18.078	17.233
2003	11.842	11.952	66.430	117.172
2002	2.731	2.717	36.649	30.750
2001	2.874	2.887	43.323	36.733
2000	2.829	2.810	46.794	43.530

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Tabel 2.19.
Bongkar Muat Barang Angkutan Laut pada Pelabuhan Laut
Tanjung Redeb Menurut Jenis Barang Per Bulan

Bulan Month	Barang dimuat/Cargo Loading					
	Kayu Bergajian Sawn Timber (m3)	Kayu Bundar Log (m3)	Batu bara Coal (ton)	Pulp	Crude Palm Oil (ton)	Lainnya General Cargo (ton/ m3)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	7.291	42.436	695.481	5.252	1.386	1.911
Februari	3.704	15.410	697.772	12.097	3.908	1.160
Maret	6.790	44.331	731.912	10.120	3.798	824
April	2.748	35.102	792.152	13.757	5.348	2.060
Mei	2.816	29.836	866.455	7.380	6.581	1.463
Juni	3.830	17.822	676.520	20.480	6.316	1.409
Juli	4.136	30.842	1.085.428	11.352	3.795	1.348
Agustus	4.143	19.520	746.489	34.658	3.848	4.732
September	3.867	49.437	800.429	15.105	5.950	4.030
Oktober	6.239	31.040	523.173	6.341	7.987	5.122
November	2.953	23.046	988.941	9.576	5.392	5.592
Desember	907	33.250	526.212	12.686	6.195	1.342
<i>Jumlah/Total</i>						
2004	49.424	372.072	9.130.964	158.804	60.504	30.993
2003	52.896	609.383	7.720.002	101.477	-	30.880
2002	51.250	964.227	6.959.640	192.676	-	44.007
2001	30.936	986.836	6.654.565	318.751	-	48.446
2000	20.704	741.675	4.738.851	317.632	-	18.678

Lanjutan : Tabel/Table 9.4.2
Continued

Bulan Month	Barang Dibongkar/Cargo Unloading						
	BBM Oil (m3)	Semen Cement (ton)	Gula Sugar (ton)	Beras Rice (ton)	Minyak Hitam (ton)	Kayu Akasia m3	Lainnya General Cargo (ton/m3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	6.938	1.050	93	415	18.083	35.898	6.720
Februari	6.952	1.380	62	245	12.812	33.230	3.200
Maret	9.221	1.390	84	241	11.252	46.475	10.988
April	8.039	1.635	68	95	8.700	66.758	3.200
Mei	10.144	1.300	52	100	9.195	48.779	6.169
Juni	8.948	75	43	115	9.350	41.214	8.000
Juli	10.259	1.715	33	320	9.298	30.108	7.658
Agustus	9.512	2.414	45	69	51.227	15.100	5.488
September	11.361	770	52	410	11.520	29.423	3.700
Oktober	10.934	673	63	560	10.329	18.101	-
November	10.051	978	24	175	7.869	28.008	3.200
Desember	11.156	790	46	145	8.703	46.049	9.200
<i>Jumlah/Total</i>							
2004	113.515	14.170	665	2.890	168.338	439.143	67.523
2003	103.250	28.759	973	3.624	165.362	46.714	186.190
2002	107.936	18.418	1.137	3.521	7.138	321.193	458.850
2001	94.101	10.442	3.440	6.325	7.398	524.495	612.915
2000	79.213	5.149	3.281	7.744	5.088	75.088	723.509

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Banyaknya pilihan transportasi menyebabkan tiap armada angkutan umum harus terus berusaha memperbaiki sarana dan pelayanan mereka. Salah satu angkutan yang terus mengalami peningkatan adalah angkutan udara. Peningkatan ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan udara. Jika pada tahun 2003 jumlah penumpang berangkat sebanyak 39.733 maka pada tahun 2004 meningkat menjadi 43.817 orang, demikian pula jumlah penumpang yang datang tahun 2003 sebanyak 38.927 orang maka tahun 2004 meningkat menjadi 43.817 orang. Hal lain yang mengindikasikan semakin meningkatnya

transportasi udara adalah meningkatnya barang muatan, bagasi, dan pos/paket yang dimuat dan dibongkar di Bandara Udara Kalimantan. Berikut ini adalah data statistik jumlah pesawat dan penumpang, barang muatan, bagasi, dan pos/paket yang dimuat dan dibongkar di Bandara Udara Kalimantan.

Tabel 2.20.
Pesawat dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Udara Kalimantan Per Bulan

Bulan <i>Month</i>	Pesawat/ <i>Aircraft</i>		Penumpang/ <i>Passenger</i>	
	Datang <i>Arrive</i>	Berangkat <i>Departure</i>	Datang <i>Arrive</i>	Berangkat <i>Departure</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	205	204	3.468	4.336
Februari	222	226	3.500	3.492
Maret	229	235	3.834	3.556
April	215	215	3.169	3.537
Mei	236	236	3.654	3.765
Juni	244	244	3.745	3.897
Juli	215	216	3.733	3.921
Agustus	239	240	3.398	3.537
September	216	215	3.476	3.825
Oktober	211	211	3.636	4.043
November	224	224	3.918	4.358
Desember	233	232	4.286	4.291
<i>Jumlah/Total</i>				
2004	2.689	2.698	43.817	46.558
2003	2.630	2.629	38.927	39.733
2002	2.818	2.818	36.953	22.299
2001	1.908	1.908	30.602	31.376
2000	1.238	1.238	21.072	20.761

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Tabel 2.21.
Barang Muatan, Bagasi, dan Pos/Paket
yang Dimuat dan Dibongkar di Bandar Udara Kalimantan Per Bulan

Bulan <i>Month</i>	Barang/ <i>Cargo</i>		Bagasi/ <i>Baggage</i>		Pos Paket/ <i>Airmail</i>	
	Muat <i>Loaded</i>	Bongkar <i>Unloaded</i>	Muat <i>Loaded</i>	Bongkar <i>Unloaded</i>	Muat <i>Loaded</i>	Bongkar <i>Unloaded</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	6.608	12.824	29.081	26.869	1.119	424
Februari	5.659	12.805	21.786	26.964	672	548
Maret	6.909	17.715	24.326	32.478	986	447
April	3.559	18.966	23.016	25.080	476	169
Mei	4.402	18.810	23.479	26.397	671	81
Juni	4.258	14.201	25.049	25.106	673	54
Juli	39.975	18.403	26.277	28.129	470	277
Agustus	4.842	17.329	23.127	22.552	800	158
September	6.116	19.909	24.920	24.551	862	472
Otober	8.121	16.829	28.184	25.852	1.299	434
November	6.756	17.135	31.485	29.192	976	183
Desember	6.396	24.657	29.715	33.277	1.293	485
<i>Jumlah/Total</i>						
2004	103.601	209.583	310.445	326.447	10.297	3.732
2003	112.718	186.221	272.983	290.626	11.538	5.817
2002	161.460	103.028	281.099	239.978	9.041	20.741
2001	55.148	125.142	188.035	194.057	32.979	10.983
2000	109.019	213.045	118.872	135.896	26.092	8.260

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Namun demikian ada fenomena lain yang terjadi bahwa dengan meningkatnya jenis dan sarana komunikasi karena demikian majunya teknologi informasi, menyebabkan masyarakat mulai merubah cara komunikasi dari cara lama ke cara yang baru. Hal ini mengakibatkan menurunnya penggunaan jasa pos dan giro yang berimbas menurunnya penerimaan pos dan giro dari 3,11 milyar pada tahun 2003 turun menjadi 2,69 milyar rupiah pada tahun 2004.

Tata Ruang. Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola dan Pengembangan Tata Ruang di Kabupaten Berau terdiri atas Kawasan Lindung (Kawasan Lindung dan Kawasan Suaka Margasatwa) dan Kawasan Budidaya Kehutanan (Budidaya Non Kehutanan dan Budidaya Kehutanan). Dengan sebaran luasan Kawasan Lindung Sebesar 613.148 Ha sedangkan untuk persebaran luasan Budidaya Kehutanan adalah sebesar 940.823 Ha

Lingkungan Hidup. Dengan potensi sumber daya alam alam di Kabupaten Berau yang melimpah memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, dan ini ditunjukkan dengan adanya indikasi nilai tingkat kekeruhan (turbidity) yang cukup tinggi yang dapat dipantau pada aliran sungai Segah dan Sungai Kelay, hal ini berakibat pada peningkatan sedimentasi pada badan sungai Kelay dan Segah dan juga pada akhirnya akan mengganggu kehidupan biota air di sungai serta juga akan berakibat pada berkurangnya kapasitas daya dukung dan tampung sungai (Banjir). Untuk mengatasinya perlu adanya pengelolaan/eksploitas sumber daya alam yang bijaksana dan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum lingkungan yang tegas serta adanya partisipasi dan kesadaran stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mencintai dan menjaga lingkungan sekitarnya

2.4. Sosial Budaya

Jumlah, Sebaran dan Komposisi Penduduk. Kabupaten Berau pada tahun 2004 tercatat 146.451 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 1994-2004 sebesar 6,85 % per tahun dengan kepadatan penduduk 4,29 Jiwa per km² pada tahun 2004. (Tabel 2.2). Sistem administrasi kependudukan penting dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau dan serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

Sebaran penduduk Kabupaten Berau tidaklah merata. Daerah yang landai hanya 5.4% dari total Kabupaten Berau, tetapi dihuni oleh 55.4% penduduk Kabupaten Berau. Dari Tabel berikut dapat dilihat bahwa konsentrasi penyebaran penduduk terkonsentrasi di kota Tanjung Redeb. Kecamatan Kelay merupakan wilayah yang

kepadatan penduduknya terendah di Kabupaten Berau. Penataan dan persebaran serta mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Berau masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang mencapai 123,134 yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 120 orang penduduk laki-laki. Jika dirinci perkecamatan maka Kecamatan Maratua memiliki sex rasio terkecil dengan 110,69 dan kecamatan terbesar adalah Kecamatan Kelay dengan sex rasio 132,81.

Penjelasan Teknis:

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.22.
Laju Pertumbuhan penduduk tahun 1993-2004

T a h u n <i>Y e a r</i>	Jumlah Penduduk <i>Number of Population</i> (jiwa/person)	Laju Pertumbuhan <i>Growth Rate</i>
(1)	(2)	(3)
1994	75.471	6,75
1995	90.064	21,36
1996	99.738	10,74
1997	104.607	4,88
1998	107.188	2,47
1999	109.366	2,03
2000	118.096	7,98
2001	125.571	6,33
2002	131.059	4,37
2003	136.628	4,66
2004	146.451	6,85

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Tabel 2.23.
Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan <i>District</i>	Rumah Tangga <i>Household</i>	Penduduk <i>Population</i>	Luas Wilayah <i>Area</i> (Km ²)	Kepadatan/ <i>Density</i>	
				Pend./RT <i>Popul/</i> <i>Household</i>	Pend./Km ² <i>Popul/Km²</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Kelay</i>	1.122	4.165	6.134,60	3,71	0,68
<i>Talisayan</i>	3.147	12.820	2.473.66 *	4,07	3,74
<i>Tubaan</i>	1.598	6.680	2.977,72	4,18	2,24
<i>Biduk – Biduk</i>	1.834	8.608	3277.77*	4,69	2,23
<i>Pulau Derawan</i>	1.446	7.487	3.858,96	5,18	1,94
<i>Maratua</i>	553	2.918	4.118,80	5,28	0,71
<i>Sambaliung</i>	4.964	22.744	2.403,86	4,58	9,46
<i>Tanjung Redeb</i>	9.887	48.565	23,76	4,91	2.043,98
<i>Gunung Tabur</i>	2.492	12.348	1.987,02	4,96	6,21
<i>Segah</i>	1.134	5.409	5.166,40	4,77	1,05
<i>Teluk Bayur</i>	3.469	14.707	175,70	4,24	83,71
<i>Biatan Bapinang</i>	-	2.524*	952.11*	-	-
<i>Batu Putih</i>	-	4.760*	581.14*	-	-
<i>Jumlah/Total</i>					
2004	31.646	146.451	34.127,00	4,63	4,29
2003	29.677	136.628	34.127,00	4,60	3,99
2002	28.746	131.059	34.086,29	4,56	3,84
2001	29.121	119.284	24.201,00	4,10	4,93
2000	28.993	118.096	24.210,00	4,07	4,88

Sumber : Berau dalam Angka (2004)

* Angka sementara

Tabel 2.24.
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk/ <i>Population</i>			Sex Ratio
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Kelay</i>	2.376	1.789	4.165	132,81
<i>Talisayan</i>	7.075	5.745	7.976*	122,80
<i>Tubaan</i>	3.575	3.105	6.680	115,14
<i>Biduk – Biduk</i>	4.684	3.924	6.168*	115,28
<i>Pulau Derawan</i>	4.093	3.394	7.487	120,60
<i>Maratua</i>	1.533	1.385	2.918	110,69
<i>Sambaliung</i>	12.664	10.080	22.744	125,63
<i>Tanjung Redeb</i>	26.480	22.085	48.565	119,90
<i>Gunung Tabur</i>	6.991	5.357	12.348	130,50
<i>Segah</i>	2.984	2.425	5.409	123,05
<i>Teluk Bayur</i>	8.066	6.641	14.707	121,46
<i>Biatan Bapinang</i>	-	-	2440*	124,5
<i>Batu Putih</i>	-	-	4760*	131,69
<i>Jumlah/ Total</i>				
2004	80.521	65.930	146.451	122,13
2003	74.901	61.728	136.628	121,34
2002	71.387	59.672	131.059	119,63
2001	64.969	54.315	119.284	119,62
2000	64.324	53.772	118.096	119,62

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

*Angka sementara

Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Pemberdayaan tersebut pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan kenyataan bahwa mekanisme pemberdayaan masyarakat yang diterapkan selama ini masih belum optimal di semua lini.

Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga. Pemberdayaan perempuan terutama ditujukan pada peningkatan peranserta kaum wanita dalam proses pembangunan. Dewasa ini pemberdayaan perempuan di Kabupaten Berau masih kurang, terutama pada perlindungan tenaga kerja pada ektor informal. Pendidikan perempuan di Kabupaten Berau masih perlu ditingkatkan terutama untuk ibu

rumah tangga. Peningkatan keterampilan baik melalui program PKK dan Keluarga Berencana harus terus digalakkan. Jumlah penduduk perempuan hampir berimbang dengan penduduk laki-laki dan ini dapat dilihat dari ratio antara penduduk perempuan dan laki-laki pada Tabel 2.24. Disamping program diatas, pemberdayaan perempuan juga dilakukan di lingkungan pekerjaan, baik disektor tenaga kerja maupun sektor pembangunan lainnya yang ditunjukkan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.25.
Pencari Kerja Menurut Keadaannya dan Jenis Kelamin

Keadaan <i>Condition</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belum Ditempatkan Awal Tahun 2004	1.402	311	1.713
2. Terdaftar	2.005	492	2.497
3. Ditempatkan	1.177	214	1.391
4. Dihapuskan	475	135	610
5. Belum Ditempatkan akhir tahun 2004	1.755	454	2.209

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Salah satu pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan adalah perlindungan kesehatan ibu dan anak baik melalui keluarga berencana dan atau program keluarga sejahtera. Jumlah peserta KB aktif selama tahun 2002 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2002 Peserta KB aktif sebanyak 14629 Orang atau 76 % dari pasangan usia subur (PUS). Pada tahun 2001 KB aktif mencapai 14960 Orang atau 9 % dari jumlah penduduk pada tahun 2001. Peningkatan program Keluarga Berencana ini penting untuk pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatana reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

Sesuai arahan RPJP Nasional bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan, untuk menurunkan tingkat eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penataan ketersediaan data dan statistik gender.

Partisipasi pemuda dalam pembangunan semakin membaik seiring dengan budaya olah raga yang makin meluas di kalangan masyarakat. Meskipun demikian peran perempuan terutama dibidang ekonomi dan politik masih rendah.

Budaya dan etnis. Landscape daratan Kabupaten Berau dicirikan oleh daratan rendah (38%) dan menengah (42%), dengan topografi datar hingga bergelombang. Beberapa sungai besar yang membelah Kabupaten Berau, berfungsi sebagai sarana transportasi dan sumber penghidupan penduduk lokal. Tingkat kesulitan alam ini merupakan pembatas yang masih belum terjawab dalam penyediaan infrastruktur dasar yang sistematis dan memadai, Kondisi alam seperti ini berkait dengan sebaran etnis penduduk lokal. Penduduk Kabupaten Berau, secara garis besar, dapat dibedakan menjadi penduduk pedalaman, pesisir dan perkotaan. Wilayah pedalaman umumnya didiami oleh suku Dayak Kenyah, Dayak Punan, Dayak Basap, Dayak Sagai, dan Dayak Labu. Penduduk yang menetap di daerah perkotaan dan sepanjang jalur transportasi adalah Suku Berau dan Banua serta para pendatang yang berasal dari berbagai daerah, sementara yang menghuni pesisir umumnya suku Bajau, Bugis, dan Melayu. Kondisi sebaran di atas perlu mendapatkan perhatian khusus karena menimbulkan kesenjangan dalam prioritas pembangunan Kabupaten.

Sebagian besar masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman masih memiliki ketergantungan yang sangat besar pada alam. Hal ini terlihat dari mata pencaharian mereka dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang berupa aktifitas berburu binatang seperti payau, babi hutan, burung. Hewan buruan yang mereka butuhkan semakin lama semakin langka ditemukan di sekitar kediaman mereka, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Hal berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat pedalaman

yang rata-rata masih berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi semacam ini telah membudaya di kalangan masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman, sehingga usaha yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada alam ini ada kalanya mengalami kegagalan.

Kemiskinan. Pendapatan perkapita merupakan suatu indikator atau ukuran yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Pendapatan perkapita Kabupaten Berau pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi Rp. 16,46 juta /tahun. Selama dua dasawarsa, berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pendampingan telah dilakukan. Dalam kenyataannya masih terdapat 7.402 rumah tangga miskin dari 28.609 rumah tangga sesuai pendataan Keluarga Miskin tahun 2003. Walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2002 sudah terlihat adanya penurunan keluarga miskin sebesar 2.623 rumah tangga atau 25,93 % dari total penduduk Kabupaten Berau. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Berau menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Hal ini dapat dilihat dari pendataan kemiskinan tahun 2004, bahwa ada beberapa factor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut., yaitu: (1) Kurang pangan sebesar 5.666 KK atau 19,71 %; (2) Kurang sandang sebesar 1.547 atau 5,37%; (3) Kurang papan rumah 2.167 atau 7,54 %; (4) Miskin social 3.610 atau 12,56 %; dan (5) Miskin Kesehatan 6.299 atau 24,91%; dan (6) Miskin pendidikan 6.885 atau 24,09%.

Keagamaan. Kehidupan beragama bagi masyarakat Kabupaten Berau telah berkembang dengan baik. Telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan antar umat beragama yang aman, damai, dan saling mengharagai. Penduduk Kabupaten Berau mayoritas beragama Islam yaitu 88 %, kemudian Kristen 6,6 %, Khatolik 4,9 %, Hindu 0.05% dan Budha 2,2 %. Beberapa masyarakat yang tinggal di pedalaman masih menganut

animisme yang kadang-kadang merupakan wujud budaya mereka yang diperlihatkan dari tarian maupun produk budaya lainnya.

Tabel 2.26.
Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Berau Tahun 2004

Agama	Jumlah Penganut (Orang)	%tase (%)
Islam	128.287	87,5
Katolik	7.676	5,24
Protestan	10.082	6,88
Hindu	103	0,07
Budha	303	0,21
Konghuchu	-	
Animisme/Dinamisme	-	
Jumlah	146.451	100

Sumber: Berau dalam Angka (2004)

Tabel 2.27
Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Berau Tahun 2004

Rumah Ibadah	Jumlah (Buah)	Kapasitas (Orang)
Masjid/Langgar	154 + 115	-
Gereja	60	-
Pure	1	-
Vihara	2	-
Tempekong	1	-

Sumber: Berau Dalam Angka (2004)

2.5. Hukum Dan Pemerintahan

Otonomi Daerah. Seiring hadirnya otonomi daerah di tahun 1999, Indonesia telah mengalami perubahan yang amat besar dalam sistem hukumnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Desentralisasi No. 22 dan 25 tahun 1999, yang memberikan tanggung jawab lebih besar kepada daerah (Kabupaten) dalam pengembangan daerahnya. Pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah telah berganti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bidang legislatif dianggap memiliki peran lebih besar dalam menyusun dan mengawasi peraturan perundang-undangan.

Wilayah administratif Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan, 95 desa dan 7 kelurahan. Adapun rincian dari wilayah administratif kecamatan di kabupaten Berau dirinci pada tabel 2.1.

Dalam era otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan sumberdaya alam sangat dipengaruhi oleh kebijakan daerah. Desentralisasi membuka kesempatan luas bagi pemerataan pembangunan daerah. Proses ini juga merupakan kesempatan bagi daerah untuk merencanakan dan mengelola SDA mereka sendiri. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa kesempatan-kesempatan ini tidak mungkin terwujud jika desentralisasi tidak dilaksanakan dengan baik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tidak dijalankan.

Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah antara lain adalah kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan peran dan tanggung jawab baru mereka, tidak adanya standar minimum pelayanan masyarakat serta lemahnya penegakan hukum. Proses desentralisasi mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi kunci bagi pembangunan nasional, terutama bagi kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

Eksekutif. Salah satu potensi pembangunan dan sekaligus menjadi faktor strategis yang dimiliki adalah adanya pemerintahan (dalam artian luas) yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kondisi potensial ini dapat

diperoleh karena Kabupaten Berau memiliki institusi pemerintahan dengan sistem/standar prosedur penyelesaian tugas yang tertata cukup baik. Nilai-nilai kearifan sosial, budaya dan agama senantiasa mewarnai segala aktivitas masyarakat Kabupaten Berau, sehingga menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang kondusif dan merupakan modal dasar bagi terciptanya ketertiban dan keamanan.

Otonomi daerah yang memberikan pengelolaan dan pengawasan secara luas kepada daerah, dalam implementasinya ternyata masih belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas lokal yang memadai. Oleh karena itu pengembangan kapasitas kelembagaan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memenuhi fungsi mereka dalam kerangka desentralisasi secara transparan, bertanggung jawab, dan profesional adalah hal yang mutlak untuk dipenuhi. Begitu juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang menjadi tugas utama pemerintah hendaknya terus menerus dilakukan. Masih banyak aspek-aspek lain yang perlu diperbaiki dalam konteks pelayanan publik seperti kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan, pembangunan sarana telekomunikasi & transportasi dan lain-lain.

Dalam upaya mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan penuntasan kasus-kasus KKN, langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Berau, dengan melakukan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah. Melalui pengawasan reguler, selama tahun 2004 telah direkomendasikan sebanyak 62 kasus, dengan rincian 34 kasus kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan, 10 kasus kelemahan pembinaan personil, 9 kasus dalam pengawasan intern, 1 kasus kelemahan dalam kebijakan, 5 kasus kelemahan dan perencanaan, serta 3 kasus kelemahan dalam prosedur. Dari 62 kasus temuan hasil pemeriksaan tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 45 kasus, berupa penyetoran uang ke Kas Daerah, pemberian teguran, penyempurnaan administrasi, penyampaian surat pertanggungjawaban serta pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan.

Selain pengawasan internal, juga terdapat pengawasan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat. Selama tahun 2004 terdapat 15 kali pengaduan, 12 pengaduan diantaranya disampaikan langsung kepada Bupati Berau, sedangkan 3 pengaduan lainnya disampaikan kepada instansi terkait. Dari 15 pengaduan yang telah disampaikan, dapat diklasifikasikan menjadi 10 LHP, 3 kasus terbukti, 7 tidak terbukti, serta 5 kasus masih dalam proses pemeriksaan. Dari 3 kasus yang terbukti, telah ditindaklanjuti 1 kasus berupa pelanggaran peraturan, sedangkan 2 kasus belum ditindaklanjuti.

Dalam rangkaian pemberantasan KKN, upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selain memberikan sanksi administrasi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, juga melaksanakan pengetatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Disamping itu juga dilakukan dialog dengan organisasi kemasyarakatan, mengikutsertakan elemen masyarakat dan mass media dalam pengawasan, mengadakan uji kapasitas dan kapabilitas bagi pejabat yang akan menduduki jabatan struktural maupun fungsional, melalui tim Baperjakat, serta memantapkan budaya kerja dan budaya malu bagi aparatur sebagai tanggung jawab profesi, moral dan sosial dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Legislatif. Dengan berlangsungnya proses desentralisasi, beberapa pemerintah daerah dan DPRD telah mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang tidak sejalan dengan regulasi nasional dan tidak senafas dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sebagian lembaga di tingkat daerah mengalami kekurangan kapasitas untuk memenuhi peran mereka yang baru secara transparan dan kompeten.

Tabel 2.29.
Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Berau dirinci Menurut Komisi

Komisi <i>Committee</i>	Periode <i>Periods</i>			
	1992-1997	1997-1999	1999-2004	2004-2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pemerintahan	4	4	4	4
B. Perekonomian dan Keuangan	4	4	5	6
C. Pembangunan <i>Development</i>	4	4	4	6
D. Kesejahteraan Rakyat	-	-	4	6
E. Ketua	1	1	1	1
F. Wakil Ketua	3	3	3	2
Jumlah/ <i>Total</i>	20	20	25	25

Sumber : Berau Dalam Angka (2004)

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa belum ada komisi yang secara eksplisit menangani masalah pendidikan yang dapat menghasilkan kekurangefektifan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Berau.

Untuk itu, maka upaya penyusunan dan penetapan UU khususnya di kabupaten Berau menuju terciptanya koordinasi antar sektor membutuhkan kerjasama yang erat dengan berbagai kalangan, dalam mendukung proses hukum draft RUU, pelatihan dan penjangkauan isu RUU, serta upaya untuk merencanakan berbagai peraturan dan kebijakan UU berikut penyediaan perangkat implementasi UU.

Yudikatif. Meskipun iklim ketertiban dan keamanan tergolong kondusif, akan tetapi selama tahun 2004 di wilayah hukum Kabupaten Berau, telah terjadi sebanyak 171 kasus hukum. Oleh instansi terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri

Tanjung Redeb telah diselesaikan sebanyak 166 kasus, sedangkan 37 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian. Dan diharapkan kasus yang belum diselesaikan ini dapat segera dituntaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Beberapa kasus yang masih menonjol di Kabupaten Berau yaitu kasus ilegal logging, narkoba dan senjata tajam. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau selain terus melakukan penyuluhan hukum terpadu sebagai bagian dari peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, juga menyerahkan kepada mekanisme peraturan hukum yang berlaku.

BAB III

MODAL DASAR PEMBANGUNAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten strategi di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Ibukota Kabupaten berada di Tanjung Redeb yang berjarak 462 km dari Samarinda. Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, keseluruhan potensi pembangunan akan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Berau. Potensi pembangunan ini harus dikelola dan diberdayakan secara tepat, sehingga benar-benar dapat dipergunakan untuk mengatasi hambatan yang ada saat ini. Di sisi lain juga diperlukan guna menggugah kemampuan dalam mengatasi setiap tantangan yang ada menuju terwujudnya Kabupaten Berau menjadi sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan terkemuka di wilayah Indonesia Timur tahun 2026 dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945. Potensi pembangunan tersebut meliputi antara lain:

1. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam yang terkandung didalamnya darat dan laut dan udara baik bersifat dapat diperbaharui (perkebunan dan perikanan) dan atau yang tidak dapat diperbaharui (batubara dan material lainnya) dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Berau.

2. Kondisi Kawasan dan Lingkungan

Kondisi wilayah Kabupaten Berau memiliki topografi yang terdiri dari wilayah Pesisir, wilayah Hilir dan wilayah Hulu. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakatnya melakukan berbagai aktivitas yang heterogen. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya aktivitas ekonomi yang variatif, dari daerah Pesisir sampai daerah Hulu. Disamping itu luasnya wilayah Kabupaten Berau masih memungkinkan untuk dioptimalkan bagi pengembangan wilayah.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia.

Potensi sumber daya manusia yang ada merupakan modal dasar pembangunan yang sangat penting untuk mengelola sumber daya alam

secara mandiri dalam mewujudkan Kabupaten Berau sebagai sentra industri dan daerah ekowisata berbasis pertanian dan kelautan terkemuka di wilayah Indonesia Timur tahun 2006. Dari jumlah penduduk yang ada 46 % merupakan angkatan kerja produktif. Disamping itu, mulai tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga pendidikan yang mampu mencetak sumber daya manusia merupakan modal utama terciptanya tenaga kerja terdidik.

4. Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Salah satu potensi pembangunan dan sekaligus menjadi faktor strategis yang dimiliki adalah adanya pemerintahan (dalam artian luas) yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kondisi potensial ini dapat diperoleh karena Kabupaten Berau memiliki institusi pemerintahan yang didukung dengan aparatur yang profesional, sistem/standar prosedur penyelesaian tugas yang tertata dengan baik, dan dilengkapi dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai hasil penelitian dan pengembangan yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Nilai-nilai kearifan sosial, budaya dan agama senantiasa mewarnai segala aktivitas masyarakat Kabupaten Berau, sehingga menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang kondusif dan merupakan modal dasar bagi terciptanya ketertiban dan keamanan. Hal tersebut menjamin berlangsungnya kegiatan pembangunan daerah di Kab Berau. Selain itu kehidupan berpolitik yang demokratis dan adanya sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) ikut mendukung terciptanya suasana yang tertib dan aman tersebut.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Guna menyamakan persepsi tentang arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 perlu diketengahkan Visi dan Misi Kabupaten Berau. Dengan makin memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari Pemerintah maupun Masyarakat Berau untuk bersama membangun daerahnya. Disisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan daerah baik pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) maupun Pembangunan Jangka Pendek (RKPD) di Kabuapten Berau.

4.1. Visi

Visi Kabupaten Berau untuk tahun 2006-2026 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai sentra industri dan daerah ekowisata berbasis pertanian dan kelautan terkemuka di Kawasan Timur Indonesia tahun 2026”**.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. ***Sentra Industri di Kawasan Indonesia Timur:*** adalah titik pusat, sentral, dari segala kegiatan perindustrian dalam skala luas, yang berkaitan dengan proses dan transformasi input menjadi output baik pada industri jasa maupun industri manufaktur di wilayah Indonesia Timur.
2. ***Ekowisata:*** adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan kekayaan sumber daya alam pesisir, laut maupun darat secara berkelanjutan baik yang berupa biofisik, spesies endemik dan genetik serta kelompok-kelompok etnolinguistik sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya dengan memperhatikan kelestarian ekosistem sebagai bagian dari wilayah konservasi.
3. ***Berbasis pertanian dan kelautan:*** bahwa pertanian dalam arti luas, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan serta kelautan dengan

kekayaan *mega bio diversity*nya merupakan potensi strategis yang dijadikan sebagai dasar landasan, acuan bagi kebijakan pembangunan ekonomi di bidang industri dan ekowisata pada tahun 2006-2026.

4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun kedepan, maka ditetapkan misi yang menggambarkan arah pembangunan Jangka Panjang yang diwujudkan, rumusan misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dengan berorientasi kerakyatan, memiliki daya saing dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM yang menguasai iptek berbasis imtak;
3. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Menumbuh kembangkan budaya daerah menuju masyarakat yang madani;
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara konsisten dengan mengutamakan kepentingan publik;

BAB V

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau tahun 2006-2026 adalah terwujudnya '**Kabupaten Berau sebagai Sentra Industri dan Daerah Ekowisata Berbasis Pertanian dan Kelautan Terkemuka di Wilayah Indonesia Timur tahun 2026**' untuk menuju masyarakat sejahtera dan mandiri sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau tahun 2006-2026 tersebut, pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang sesuai misi daerah.

5.1.Misi Mewujudkan Perekonomian Daerah dengan Berorientasi Kerakyatan, Memiliki Daya Saing dan Berkelanjutan

Upaya mewujudkan perekonomian daerah dengan berorientasi kerakyatan, memiliki daya saing dan berkelanjutan, ditunjukkan dengan pencapaian 4 (empat) sasaran pokok, dengan arah pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

Sasaran pertama adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh melalui pengembangan sentra industri berbasis pertanian dan kelautan, serta ekowisata yang berdaya saing global sebagai motor penggerak perekonomian daerah, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.

Untuk mencapai sasaran pertama tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

1. Dengan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah, seperti kekayaan sumber daya alam, letak geografis yang strategis di wilayah utara Kalimantan dan sumber daya penduduk yang cukup besar, maka dalam 20 tahun mendatang Kabupaten Berau perlu dikembangkan sebagai Sentra

Industri berdasarkan dengan prinsip pengembangan industri yang mengolah secara efisien dan rasional sumber daya alam, dengan memperhatikan daya dukungnya; pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar-industri ke depan. Dengan prinsip tersebut, maka fokus pengembangan industri di Kabupaten Berau diarahkan pada pengembangan industri yang berbasis pertanian dan kelautan, serta potensi SDA yang tidak terbaharui.

2. Struktur perekonomian daerah dibangun dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang berbasis pertanian dan kelautan serta ditopang oleh sektor pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan tatakelola yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
3. Untuk mewujudkan pertanian dan kelautan sebagai basis ekonomi daerah, pembangunan pertanian diarahkan melalui peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sehingga mampu bersaing di pasar lokal dan internasional. Pembangunan pertanian merupakan sektor strategis dan harus mendapatkan prioritas karena berkaitan dengan pembangunan perdesaan dan pulau-pulau kecil, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan ketahanan pangan.
4. Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai sentra industri, dilakukan dengan membangun iklim investasi kondusif agar menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya. Kabupaten Berau dilihat dari sisi letak geografis, luas wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor pendukung lainnya sangat prospektif untuk kegiatan investasi. Ketersediaan informasi melalui e-Government dan e-Business dengan mengembangkan Internet Service Provider dan Web Site menjadi sangat penting sebagai pintu pertama bagi para investor untuk melihat dan mempelajari peluang usaha di daerah.
5. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dan kelautan dilakukan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien terutama dengan mendorong industri hilir dengan melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.
6. Kawasan pertanian dan perdesaan dibangun melalui pengembangan agropolitan dengan pengembangan jaringan infrastruktur antara sentra

pertanian dan pusat-pusat pertumbuhan/ kota terdekat dalam upaya membangun keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplemen dan saling menguntungkan, mempercepat akses informasi teknologi dan pemasaran dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.

7. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan diarahkan dengan memperhatikan pemanfaatannya secara lestari dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan dilakukan dengan pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan agar secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Kepariwisata dilakukan dengan mengembangkan ekowisata dan menjadikan kawasan Derawan dengan keunikan bawah lautnya sebagai tujuan wisata terkemuka di Indonesia Timur. Potensi wisata di Pulau Derawan-Pulau Maratua-Pulau Sangalaki diintegrasikan menjadi satu kawasan wisata yang menonjolkan keasrian dan kelestarian alam bahari melalui pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang ramah dan menyatu dengan alam. Pengembangan ekowisata juga diarahkan melibatkan masyarakat lokal sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dan ikut bertanggung jawab atas kelangsungan potensi ekowisata, agar mampu mendorong peningkatan daya saing perekonomian di daerah, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan serta ditangani dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya serta daerah tujuan wisata di Kabupaten Berau.
9. Pembangunan fondasi ekonomi mikro diarahkan agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas, dan inovasi yang terjadi, melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan.

10. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
11. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di pekerjaan informal. Pasar kerja yang diwarnai hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.
12. Perdagangan diarahkan pada berkembangnya sektor riil dari yang berskala kecil dan besar, dan memperkuat posisi daerah sebagai sentra perdagangan di wilayah Indonesia Timur, serta membangun berbagai pola kerjasama perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta mengintegrasikan kegiatan ekonomi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah; mewujudkan kemandirian pedagang kecil dan menengah sehingga berdaya saing, berkelanjutan dan berkualitas.
13. Peningkatan daya-saing global perekonomian dilakukan dengan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) sebagai fondasinya, berdasarkan penguatan struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antarindustri dan antara industri dengan setiap aktivitas ekonomi terkait (sektor primer dan tersier, UKM maupun

perusahaan penanaman modal asing), serta keterpaduan kerjasama antara dinas/ instansi terkait.

14. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing dan sebagai salah satu lembaga keuangan daerah melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar/multi usaha, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam kerangka peningkatan kualitas dan daya saing produk. Pengembangan UKM menjadi bagian integral dalam mewujudkan struktur perekonomian daerah yang sehat sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri dengan memberdayakan masyarakat. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Koperasi berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Keterbatasan UKM dan koperasi dalam permodalan, teknologi, manajemen dan kepastian pasar diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan besar swasta/negara.

Sasaran kedua adalah terwujudnya pendapatan perkapita pada tahun 2026 mencapai sekitar US\$ 7600 dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 7 % dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 %.

Untuk mencapai sasaran kedua tersebut, pembangunan daerah kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

15. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dilakukan juga melalui upaya revitalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan, pengembangan kemampuan petani/nelayan/SDM pelaku usaha lainnya agar memiliki kemampuan tawar, merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.
16. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melihat kemiskinan tidak hanya dari ukuran pendapatan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar dalam bidang sosial, ekonomi budaya dan politik seperti

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

17. Pengembangan kawasan pesisir diarahkan dengan pendekatan pemanfaatan dan pengelolaan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem kawasan pesisir. Pengembangan kawasan pesisir diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menumbuhkan industri pengolahan berbasis sumber daya pesisir yang mampu menyerap tenaga kerja.
18. Pengembangan daerah tertinggal diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat secara berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana ekonomi, seperti sistem transportasi, jalan, listrik dan air bersih, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan pelatihan ketrampilan masyarakat.

Sasaran ketiga adalah kemandirian pangan secara aman dengan kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

Untuk mencapai sasaran ketiga tersebut, pembangunan daerah kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

19. Sistem ketahanan pangan dibangun sampai pada kemampuan untuk menjaga kemandirian pangan di daerah dengan mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga secara cukup, baik dalam jumlah, mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan potensi lokal serta memperhatikan *community development* dengan memperhatikan kesejahteraan petani.
20. Pengamanan ketersediaan beras diarahkan melalui pengamanan lahan sawah produktif, perluasan areal dan peningkatan produktivitas, sistem distribusi dan pengamanan harga gabah di tingkat petani serta peningkatan kemampuan petani.

21. Peningkatan produksi pangan dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap sarana produksi, modal, teknologi dan pasar, serta pengelolaan usaha dengan prinsip efisiensi dan pengusahaan dengan skala usaha yang ekonomis.
22. Swasembada daging dilakukan dengan pengembangan usaha ternak/perikanan melalui program kemitraan.

Sasaran keempat adalah terwujudnya pengelolaan, pendayagunaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berkeadilan guna memperoleh nilai tambah yang optimal bagi kepentingan daerah dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran keempat tersebut, pembangunan daerah kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

23. Pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam. Produk pengembangan mutu dan harga yang bersaing. Ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang pembangunan secara adil dan merata, tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal sehingga masyarakat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayahnya sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
24. Pendayagunaan sumber daya alam yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan dilakukan secara optimal dan lestari dengan memperhatikan daya dukung dan kemampuan pulih alaminya. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan, yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan

menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sistem pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sebagai potensi sumber daya alam daerah dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

25. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi dikelola secara berkelanjutan dengan tidak mengkonsumsi langsung, melainkan memperlakukannya sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Alternatif lainnya dengan pemanfaatan yang diimbangi dengan upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan menginvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif khususnya dalam upaya untuk menghasilkan inovasi dan kreativitas pengelolaan sumber daya alam bagi keberlanjutan ekonomi daerah, dan untuk upaya rehabilitasi, penyelamatan dan konservasi kawasan tertentu, serta untuk memperkuat pendanaan dalam rangka pencarian sumber-sumber energi alternatif.
26. Sumber daya laut merupakan sumber daya yang masih memiliki potensi besar dan merupakan sumber pertumbuhan baru yang perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas di Kabupaten Berau, maka arah pemanfaatannya dilakukan melalui pendekatan multisektor agar dapat meminimalisasi terjadinya konflik dan keberlanjutan sumber daya tersebut tetap terjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi.
27. Sumber daya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan keragaman jenis sumber daya alam yang ada di setiap

wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen multi stakeholder untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam termasuk bagi pemerintah daerah. Pengelolaan sumber daya alam, terutama di kawasan tertinggal/pedalaman diberikan perhatian khusus agar dapat dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan wilayah, namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap yang disertai penegakan hukumnya untuk menjadi pedoman pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari.

28. Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
29. Adanya pergeseran pengelolaan, pemanfaatan hutan dari hanya memanfaatkan kayu menjadi sumber daya hutan. Secara menyeluruh, seperti hasil hutan, gaharu, sarang burung dan HTI terus diupayakan pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan industri dan pulp.

5.2. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas SDM yang Menguasai IPTEK dan BERBASIS IMTAK

Upaya mewujudkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM yang menguasai IPTEK berbasis IMTAK, ditujukan dengan pencapaian 14 sasaran pokok, dengan arah pembangunan sebagai berikut:

Sasaran pertama adalah penumbuhan sentra-sentra industri/manufaktur di setiap desa/kecamatan sebagai basis ekonomi rakyat.

Untuk mencapai sasaran pertama tersebut, pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau diarahkan melalui:

30. Optimalisasi pemanfaatan prasarana transportasi yang telah tersedia secara memadai. Kecuali Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua, secara umum jalur transportasi darat antar kecamatan dan antar desa sudah cukup baik, dan begitu juga jalur dari dan ke Ibukota Kabupaten.
31. Penyusunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain, khususnya yang menghubungkan antar desa/kelurahan/kecamatan dengan Ibukota Kabupaten.
32. Pemenuhan pasokan tenaga listrik yang memadai sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat industri.
33. Pemeliharaan konservasi sumberdaya air lestari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat industri.
34. Peningkatan daya tarik daerah bagi investor local dan asing untuk menanamkan modal dan melakukan usaha di wilayah Kabupaten Berau.
35. Peningkatkan budaya inovatif yang berorientasi IPTEKS sehingga masyarakat Berau mampu bersaing di era global. Pengembangan budaya inovatif ini dikembangkan melalui penghargaan masyarakat terhadap IPTEKS melalui budaya baca tulis dan menumbuh-kembangkan mereka menjadi masyarakat pembelajar (*to become learning society*).

Sasaran kedua adalah APBD untuk pendidikan di atas 20 % dan kualitas dan kuantitas pendidikan telah mencapai/melampaui rata-rata standar nasional.

Untuk mencapai sasaran kedua tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

36. Penguatan wawasan kependidikan para anggota legislatif dan pelaksana pemerintahan agar memiliki pemahaman dan komitmen yang jelas terhadap proses peningkatan SDM melalui pendidikan persekolahan.
37. Penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.
38. Pelaksanaan evaluasi diri pada setiap satuan pendidikan dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

39. Pemberian perhatian yang lebih besar kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (*remote areas*), dan masyarakat tertinggal melalui beasiswa, *school grant* atau *block grant*.
40. Pemantapan pengelolaan pendidikan dengan menerapkan prinsip *good and clean governance*.
41. Pengembangan kapasitas dinas pendidikan sehingga mampu melayani secara optimal kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu.
42. Penguasaan teknologi informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat terdidik.
43. Penerapan manajemen berbasis sekolah bagi setiap satuan pendidikan.

Sasaran ketiga adalah keseimbangan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan serta masyarakat tani pedalaman menjadi penyangga agro-industri.

Untuk mencapai sasaran ketiga tersebut, pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau diarahkan melalui:

44. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi wilayah, dan pembukaan kawasan-kawasan industrial terpadu yang lebih banyak lagi menampung tenaga kerja.
45. Pembangunan prasarana dan sarana social yang merata dan berkeadilan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
46. Memotong isolasi ke daerah-daerah pedalaman melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tidur bagi perkebunan.
47. Membuka dan memperluas areal perkebunan serta membangun pabrik pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi.
48. Membuka lowongan kerja bagi pemuda-pemuda pedalaman/perdesaan untuk mengisi pusat-pusat industri.
49. Membuka pabrik pengolahan hasil hutan non timber di daerah pedesaan/wilayah pinggiran.

Sasaran keempat adalah para pekerja memiliki kompetensi/ketrampilan setara dengan pekerja luar negeri sehingga mampu berkompetisi dalam persaingan global.

Untuk mencapai sasaran keempat tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

44. Pengembangan perekonomian yang berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian berkeunggulan kompetitif dengan prinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan IPTEKS dan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi dan sumber daya alam sesuai keunggulan daerah.
45. Pengembangan industri yang mengolah secara efisien dan rasional sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukungnya dan diperlakukan sebagai input untuk memperkuat kompetensi para pekerja.
46. Pengembangan satuan-satuan pendidikan/sekolah ketrampilan yang membekali calon-calon pekerja dengan *life skill education* dan atau memperkuat yang telah bekerja dengan teknologi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
47. Pengembangan jaringan dengan luar negeri dan dengan pekerja-pekerja asing yang berkeahlian tinggi di daerah agar terjadi penularan atau pengimbasan ketrampilan secara sistematis terhadap para pekerja local.

Sasaran kelima adalah Kabupaten Berau menjadi pusat keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS) yang menjadi acuan daerah lain di Propinsi Kalimantan Timur.

Untuk mencapai sasaran kelima tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui

48. Peningkatan dan perluasan pusat-pusat pendidikan yang berorientasi global dan berbasis pada kekayaan dan keragaman serta kearifan budaya lokal, dengan memperhitungkan pilar-pilar pembelajaran yakni belajar untuk mengetahui, dapat melakukan, dapat mandiri, dan dapat bekerjasama (*learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*).
49. Pengembangan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada hak asasi manusia, serta penguatan pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk.

50. Efisiensi dan efektivitas, pemerataan, kualitas dan relevan dengan perkembangan masyarakat global yang terus berubah secara cepat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan budaya inovatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta penggalakan masyarakat untuk gemar membaca.
51. Mengarahkan budaya konsumtif menjadi budaya produktif dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk menghasilkan berbagai produk kreatif yang mengekspresikan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional dengan tetap mempertimbangkan harkat, martabat dan peradaban manusia yang luhur.
52. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dan wanita di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan prestasi olah raga di berbagai cabang olah raga.
53. Pemanfaatan secara optimal jaringan komunikasi dan informasi di semua daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi (*need for achievement*) dan mampu bersaing dengan masyarakat luar negeri.
54. Menciptakan jaringan informasi yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, dengan sistem yang menghubungkan antar komunitas dan masyarakat Berau sendiri di satu sisi dan dengan masyarakat global di sisi yang lebih luas dengan biaya yang murah dan terjangkau.

Sasaran keenam adalah pekerjaan sektor non formal menjadi primadona bagi angkatan muda.

Untuk mencapai sasaran keenam tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

55. Pemberian fasilitas oleh pemerintah kepada generasi muda untuk mendorong melakukan usaha di berbagai sektor serta melakukan pembinaan untuk menjaga iklim berprestasi kerja dan usaha serta rasa bangga generasi muda menjadi wiraswastawan.
56. Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk pengembangan agribisnis yang dipinjamkan kepada angkatan muda pencari kerja untuk mengelola,

memproduksi dan mendistribusikannya berdasar aturan yang berlaku di daerah.

57. Pembekalan dan pembinaan berbagai jenis ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan jaman serta tuntutan akan teknologi tinggi (*hitech*).
58. Perubahan cara pandang para pencari kerja untuk bangga terhadap bidang-bidang kerja kewirausahaan sehingga tumbuh mindset positif angkatan muda terhadap usaha sektor nonformal.

Sasaran ketujuh adalah pelayanan pendidikan melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional.

Untuk mencapai sasaran ketujuh tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

59. Perbaiki input (siswa, guru, prasarana-sarana, manajemen, regulasi)
60. Perbaiki proses (pelatihan dan pembinaan guru secara terus menerus)
61. Perbaiki output (tingkat kemampuan bertaraf global)
62. Perbaiki outcome (mampu bersaing dalam percaturan global).

Sasaran kedelapan adalah Kabupaten Berau menjadi Pusat Keunggulan (*center of excellence*) di Propinsi Kalimantan Timur.

Untuk mencapai sasaran kedelapan tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

63. Pengembangan Pusat Sumber Belajar di setiap desa/kelurahan dan kecamatan sebagai sumber inspirasi guru dalam mengembangkan inovasi pendidikan dan pembelajaran sehingga akan muncul guru-guru yang kapabel, innovator dan mampu menjadi pengembang yang kreatif di bidang pendidikan dan pembelajaran.
64. Pelaksanaan penyegaran kemampuan guru secara terus menerus berdasar perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta seni yang bertaraf internasional dengan tetap mempertahankan kearifanlocal.
65. Peningkatan kemampuan guru untuk lebih menguasai substansi, metodologi, dan evaluasi melalui pendidikan dan pelatihan secara teratur dan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar negeri.

66. Pengadaan prasarana dan sarana perpustakaan di setiap desa/kelurahan, dan kecamatan serta penggalakan gemar membaca bagi masyarakat dan upaya mengembangkan iklim kompetisi masyarakat local untuk menciptakan produk-produk IPTEKS yang berguna bagi masyarakat daerah, nasional, dan internasional.

Sasaran kesembilan adalah pelayanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan telah memenuhi standar ISO.

Untuk mencapai sasaran kesembilan tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

67. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upayan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan, peningkatan perbekalan kesehatan dengan memperhatikan dinamika kependudukan dan perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEKS dan globalisasi, kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.
68. Pengadaan dan pengembangan pusat-pusat kesehatan masyarakat (Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Posyandu) mengikuti standar internasional serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terus menerus terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
69. Pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga paramedis dilakukan secara terencana, terprogram dan terus menerus, dan pemantauan terus menerus atas pelayanan paramedis terhadap masyarakat.
70. Pengembangan teknologi kedokteran dan kesehatan dilaksanakan dengan mengikuti tuntutan masyarakat dan kemajuan IPTEKS.

Sasaran kesepuluh adalah dokter-dokter dan tenaga paramedis di Kabupaten Berau memiliki kompetensi tingkat internasional.

Untuk mencapai sasaran kesepuluh tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

71. Pendirian dan pengembangan rumah sakit pendidikan agar dapat dihasilkan dokter dan tenaga paramedis yang memiliki kompetensi tinggi dan berorientasi pada optimalisasi pelayanan masyarakat dan mau

memperbaharui dan meningkatkan secara terus menerus kemampuan dan kompetensinya.

72. Program diklat yang terencana, sistematis, bertahap, dan terus menerus bagi semua tenaga paramedis agar dapat selalu mengikuti perkembangan baru di dunia kedokteran dan kesehatan.
73. Penempatan dokter-dokter spesialis di setiap puskesmas dan pusat-pusat kesehatan non puskesmas.
74. Penganggaran secara permanen, berlanjut dan meningkat bagi peningkatan kualitas tenaga dokter dan paramedis dengan mengikutkan mereka ke program pendidikan lanjut untuk meningkatkan kompetensi profesi dan spesialisasi baik di dalam maupun luar negeri.

Sasaran kesebelas adalah Kabupaten Berau sebagai penghasil manusia-manusia unggul.

Untuk mencapai sasaran kesebelas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

75. Peningkatan dan perluasan mutu pendidikan yang berbasis khazanah kebudayaan local dengan berwawasan global yang mengacu kepada pemerolehan IPTEK berbasis IMTAK.
76. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat melalui pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan merata, pemberian asupan gizi bagi balita dan anak-anak serta pensejahteraan setiap keluarga melalui program keluarga cerdas.
77. Pengembangan dan perluasan pelaksanaan program life skill (kecakapan hidup) bagi peningkatan kecakapan personal, kecakapan social, kecakapan emosional, dan kecakapan vokasional.
78. Pencapaian SMP. Bahwa semua satuan pendidikan di Berau dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah/Kejuruan, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Kepemudaan, dan Pendidikan Olah Raga telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM untuk Pendidikan Dasar ialah: 95% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI; Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi dari 1% dari siswa yang bersekolah; 90% sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;

90% dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi; 90% guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 95% siswa memiliki buku yang lengkap pada setiap mata pelajaran; jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30-40 siswa; 90% dari siswa yang mengikuti uji sample mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai yang memuaskan; 95% dari lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs.

SPM untuk SMP/MTs adalah: 90% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs; APS tidak melebihi 1%; 90% sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis yang ditetapkan secara nasional; 80% sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya; 90% dari jumlah guru yang diperlukan terpenuhi; 90% guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 100% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran; jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 - 40 siswa; 90% dari siswa yang mengikuti uji sample mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan"; 70% dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan.

SMP untuk Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) adalah: 60% anak dalam kelompok usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK; APS (angka putus sekolah) tidak melebihi 1%; 90% sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknik yang ditetapkan secara nasional; 80% sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya; 90% dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi; 90% guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 100% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran; jumlah siswa per kelas antara 30-40 siswa; 90% dari siswa yang mengikuti uji sample mutu standar nasional mencapai nilai memuaskan; 25 % dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

SPM untuk Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas: APS tidak melebihi 1% dari siswa yang bersekolah; 90% sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional; 80

% sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya; 90% guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 100% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran; jumlah siswa per kelas antara 30-40 siswa; 20% dari lulusan SMK melanjutkan ke perguruan tinggi yang terakreditasi; 20% dari lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

SPM pelayanan Pendidikan Non Formal ialah: semua penduduk usia produktif (15-44 tahun) tidak melebihi 7%; jumlah orang buka aksara dalam kelompok usia di atas 44 tahun tidak melebihi 30%; tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbaharui terus menerus.

SPM Pendidikan Taman Kanak-kanak ialah: 20% jumlah anak usia 4-6 tahun mengikuti program TA/RA; 90% guru layak mendidik di TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 90% TK/RA memiliki sarana dan prasarana bermain/belajar; 60% TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah.

SPM untuk Pendidikan Kepemudaan ialah: tersedianya 5 program kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan pendidikan; partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, social-ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5% setiap tahun; angka pengangguran pemuda menurun 5% setiap tahun.

SPM untuk Pendidikan Olah Raga ialah: 65% siswa mengikuti kegiatan cabang olah raga yang beragam diluar mata pelajaran olah raga di sekolah; 100% terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berkreasi dan berpartisipasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum; 70% siswa memiliki tingkat kebugaran yang baik; 15 klub olah raga pelajar dibina di wilayah kabupaten/kota; 10 siswa per satuan pendidikan yang terpilih mengikuti POPDA (Pekan Olah Raga Pelajar Daerah); 1 lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah; 1 orang guru penjas mengajar 9 rombongan belajar; 75% peralatan olah raga sesuai cabang olah raga; 7

cabang olah raga dikompetisikan secara terukur minimal setiap 2 tahun sekali; 80% berfungsinya KONIDA (Komite Nasional Olah Raga Daerah)..

Sasaran kedua belas adalah Kabupaten Berau sebagai penghasil manusia sehat dan produktif.

Untuk mencapai sasaran kedua belas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

79. Pemberian layanan kesehatan yang prima terhadap semua anggota masyarakat sehingga usia harapan hidup meningkat hingga di atas 70 tahun.
80. Meningkatkan gizi keluarga melalui pemanfaatan lahan-lahan sekitar pekarangan sebagai sumber penghasil protein nabati dan hewani serta sumber-sumber sayur asupan bervitamin tinggi serta obat-obatan alamiah (program apotik hidup dan warung sayur hidup).
81. Menekan angka kekurangan pangan dari 19,71% menjadi kurang dari 5% melalui optimalisasi produktivitas masyarakat usia produktif dan pemanfaatan lahan-lahan tidur sebagai basis pertanian rakyat.
82. Menekan angka miskin kesehatan dari 24,91% menjadi kurang dari 5% melalui program penyadaran masyarakat, penambahan dokter, penambahan tenaga paramedis, dan penambahan pusat-pusat pelayanan kesehatan.
83. Pembangunan ekonomi mikro dan iklim berwiraswasta agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektifn(teknologi, mutu, kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik).

Sasaran ketiga belas adalah layanan kesehatan di Kabupaten Berau menjadi acuan nasional.

Untuk mencapai sasaran ketigabelas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

84. Program layanan kesehatan prima pada pusat-pusat kesehatan.
85. Pusat-pusat kesehatan memiliki sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan berstandar ISO.
86. Semua tenaga paramedis memiliki sertifikasi kompetensi standar ISO.

87. Pusat-pusat kesehatan mampu melaksanakan layanan kesehatan berdasar standar ISO.

Sasaran keempat belas adalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Berau menjadi 5%.

Untuk mencapai sasaran keempat belas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

88. Menaikan *income* perkapita hingga di atas standar keluarga sejahtera nasional melalui program *Zero Poor Community 2025* yang dilakukan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya (alam, manusia) bagi kesejahteraan rakyat.
89. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan wilayah tertinggal di sekitarnya sebagai sistem pengembangan ekonomi yang sinergis berbasis produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi antar sektor di semua mata rantai usaha.
90. Debirokratisasi perijinan usaha sehingga dapat memotivasi iklim berusaha yang sehat dan kompetitif serta dukungan program, biaya/modal dan pembinaan dari pemerintah.

5.3.Misi Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam kerangka mewujudkan tersedianya infrastruktur yang memadai, pembangunan infrastruktur diarahkan pada pencapaian 3 (tiga) sasaran pokok sebagai berikut :

Sasaran pertama adalah tersusunnya jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain, khususnya pelabuhan, lapangan terbang, kereta api, dan jalan raya dalam sistem jaringan inter dan antar-moda, baik antarnegara tetangga maupun dalam dan antar-wilayah NKRI dengan tingkat keselamatan, jaminan kelaikan prasarana dan sarana sesuai dengan standar internasional.

Untuk mencapai sasaran pertama tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan pada:

91. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada daerah yang terisolasi sehingga dapat terjadi akselerasi didalam interaksi antar wilayah yang lebih maju dalam kerangka peningkatan perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
92. Pertumbuhan kota Tanjung Redeb dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan, melalui: Penerapan manajemen perkotaan (*urban-sprawl management*) yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga (*buffer zone*) di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam kerangka peningkatan pendapatan asli daerah, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil di sekitar kota inti agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai *dormitory town* tetapi dapat menjadi kota mandiri; Pengembangan kegiatan ekonomi kota (*urban economic development*) yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dan lain-lain; serta peningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan;

Revitalisasi kawasan kota (*urban revitalization*) meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui membangun kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda; Serta pengembangan peran serta masyarakat sebagai komponen yang terintegrasi didalamnya;

93. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (depleksi) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, sering pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarkis dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya ditingkatkan sehingga dalam 20 tahun mendatang terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang *market friendly*, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh (*cities without slum*) sesuai dengan *Millennium Development Goals* (MDGs). Sejalan dengan pemenuhan hunian yang layak, pembangunan prasarana dan sarana diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan secara menyeluruh di Kabupaten Berau hingga mencapai 100%; peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak hingga mencapai 100% dan pengembangan sistem sanitasi terpusat.

94. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, *credible*, mandiri dan efisien.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.

Pembangunan pembangunan perumahan dan perkantoran Pemerintah Daerah yang refresentatif beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Sasaran kedua adalah terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal sesuai permintaan kebutuhan tenaga listrik termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi tercapainya tingkat efisiensi yang memuaskan baik sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi; terwujudnya sistem ketenagalistrikan yang berbasis pada energi terbarukan, PLTA dan energi fosil non BBM; serta terciptanya industri penunjang ketenagalistrikan dalam negeri yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem kelistrikan nasional.

Untuk mencapai sasaran kedua tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan pada:

95. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal sesuai permintaan kebutuhan tenaga listrik termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi; tercapainya tingkat efisiensi yang memuaskan baik sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi; terwujudnya sistem ketenagalistrikan yang berbasis pada energi yang ramah lingkungan; serta terciptanya industri penunjang ketenagalistrikan yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem kelistrikan didaerah.

Sasaran ketiga adalah terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga berkelanjutan fungsi sumber daya air; terwujudnya pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas; dan terwujudnya pengendalian daya rusak air yang mampu melindungi keselamatan jiwa dan harta benda penduduk.

Untuk mencapai sasaran ketiga tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan pada:

96. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga berkelanjutan fungsi sumber daya air; terwujudnya pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas; dan terwujudnya pengendalian daya rusak air yang mampu melindungi keselamatan jiwa dan harta benda penduduk. Pembangunan sumberdaya air diarahkan untuk menjaga keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian

fungsi daerah tangkapan air (*catchment area*) dan keberadaan air tanah serta pengamanan daerah aliran sungai; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan realibilitas pasokan air; memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta pemanfaatan sumber air sebagai salah satu energi pembangkit listrik (PLTA).

5.4. Menumbuh Kembangkan Budaya Daerah Menuju Masyarakat yang Madani

Upaya menumbuh kembangkan budaya daerah menuju masyarakat yang madani, ditujukan dengan pencapaian 2 sasaran pokok, dengan arah pembangunan sebagai berikut:

Sasaran pertama adalah terbentuknya watak masyarakat yang religius, bermoral, dan beretika sebagai landasan kehidupan sosial yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, damai dan sejahtera.

Untuk mencapai sasaran pertama tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan pada:

97. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, penyediaan sarana dan prasarana peribadatan sehingga menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.
98. Pembangunan agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
99. Pembinaan kelompok-kelompok interes bidang keagamaan di kalangan generasi muda serta penumbuhan kepedulian masyarakat untuk

pengawasan (*public control*) dalam penyebaran teknologi informasi dan hiburan, serta masuknya budaya asing untuk mencegah terjadinya degradasi moral.

Sasaran kedua adalah terbentuknya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya daerah dan berjiwa sportif yang akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyokong pembangunan daerah dalam kondisi masyarakat yang beragam (pluralitas).

Untuk mencapai sasaran kedua tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan pada:

100. Sistem jaminan sosial dikembangkan bagi seluruh masyarakat Berau sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan diupayakan tidak merusak budaya tolong menolong yang telah berakar di masyarakat.
101. Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
102. Pembangunan dan pengembangan seni budaya tradisional dan pelestarian situs-situs purbakala dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Berau yang cinta dan hormat terhadap budaya daerah sendiri.
103. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan penyeteraan gender di tingkat daerah dan nasional .
104. Budaya politik dikembangkan dengan titik berat pada proses penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media; serta perwujudan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai

pentingnya memelihara persatuan bangsa dalam wawasan kebangsaan dan ketahanan masyarakat.

5.5. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa dengan Mengutamakan Kepentingan Publik

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan kepentingan publik, ditunjukkan dengan pencapaian 4 sasaran pokok, dengan arah pembangunan daerah sebagai berikut:

Sasaran pertama Terciptanya pengendalian, pengawasan dan supremasi penegakan hukum di daerah demi terciptanya peradilan yang lebih profesional, transparan dan bertanggung jawab

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertama, pembangunan daerah kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

105. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penuntasan penyalahgunaan kewenangan, KKN, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penegakan supremasi hukum dan terjaminnya Hak Asasi Manusia.
106. Meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara menuju pemerintahan yang terbuka dengan terwujudnya sistem politik yang kredible melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat beserta komponennya.
107. Menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan dengan mempertimbangkan golongan ekonomi lemah dan aturan masyarakat adat, adapun peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun alternative dispute resolution dilakukan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Sasaran kedua adalah meningkatkan dukungan kebijakan aspiratif serta profesionalisme aparatur di daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu mendukung pembangunan daerah.

Adapun untuk mencapai sasaran pembangunan kedua, pembangunan daerah Kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

109. Memujudkan komitmen bersama dalam membangun paradigma *good and democratic governance* dalam sistem pemerintahan demokratis yang mengedepankan kepentingan publik melalui sinergitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
110. Perbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah daerah yang memadai harus didukung secara penuh agar pelaksanaan tugas dan kewajiban aparatur pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
111. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat penyelenggara administrasi Pemerintah Daerah melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
112. Meningkatkan dukungan infrastruktur dan kualitas pengelolaan utilitas untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan berdaya saing.
113. Mewujudkan dan mendorong internalisasi Mekanisme Konsultasi Publik (MKP) sebagai sebagai salah satu instrumen peran serta masyarakat dalam pengembangan kebijakan peraturan dan perizinan di daerah.
114. Meningkatkan peranan teknologi dalam mendukung upaya pencerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi yang terpadu dan merata.

Sasaran ketiga adalah refokusing postur dan struktur pertahanan dengan melibatkan seluruh potensi yang diselenggarakan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan ketiga, pembangunan daerah kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

115. Meningkatkan profesionalisme dan keterlibatan TNI, aparat pemerintah daerah dan masyarakat setempat secara sinergis sebagai ujung tombak

dalam upaya penjagaan integritas dan kedaulatan wilayah melalui pengembangan secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas pertahanan.

116. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri dan identitas bangsa melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul.
117. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah, dan pembukaan kawasan-kawasan industrial terpadu yang lebih banyak lagi menampung tenaga kerja.
118. Penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.

Sasaran keempat adalah terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsesus dan pedoman politik dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai sasaran pembangunan keempat, pembangunan daerah kabupaten Berau dalam jangka panjang diarahkan melalui:

119. Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga produk hukum di daerah selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat baik sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum kerjasama dengan berbagai komponen lembaga terkait di daerah.
120. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dicapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2025 merupakan acuan bagi visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Berau yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2011 dan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan , yang kemudian dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Pemerintah Daerah Berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi dan arah kebijakan Pembangunan Tahun 2006-2026 yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2011;
3. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan mengacu dan berpedoman kepada Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau berkewajiban menjamin konsistensi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Berau berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2011.

BAB VII

PENUTUP

Dalam perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Berau yang bersifat strategis keterlibatan masyarakat menjadi lebih tinggi, sehingga produk perencanaan tersebut didukung oleh semua pihak (komitmen stakeholder) terutama masyarakat. Penentuan kebijakan lebih didasarkan pada hasil kesepakatan daripada hasil keputusan sepihak (*top down*). Kebutuhan sisi masyarakat lebih diutamakan atau diprioritaskan daripada kebutuhan perencanaan (Pemerintah). Hal lainnya adalah orientasi politis lebih dipentingkan daripada orientasi manajemen, dan focus perencanaannya lebih diarahkan pada kebijakan daripada aspek operasional. Perencanaan jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau juga merupakan salah satu cara daripada perencanaan strategis daerah.

Penyusunan kebijakan meliputi kajian kebijakan dan perumusan kebijakan pengkajian kebijakan dimaksudkan untuk meninjau kembali segala usaha yang telah dilakukan dan sedang dilaksanakan serta meneliti upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Perumusan kebijakan dimaksud untuk melihat berbagai alternative dalam mengatasi permasalahan yang timbul dan berkembang dimasyarakat. Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan perumusan kebijakan lebih mempertimbangkan aspek prioritas dan Nasional secara luas, Rumusan kebijakan yang disusun harus mendapat persetujuan oleh DPRD. Pengembangan sistem perencanaan yang baik perlu mempertimbangkan pergeseran paradigma sistem Pemerintah (*Governance sistem*) dari sifat otokratik ke demokratik, dari monolitik ke pluralistic, dari sentralistik ke desentralistik, dan dari niteral ke interaksionis (dari pemisahan peran pemerintah dan masyarakat ke peran pemerintah bersama masyarakat)

Proses manajemen publik, berkembang nilai-nilai baru yang semula proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal dalam pemerintah kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan kualitas kepada pengguna dan pendegelasan sebagian tugas pelayanan publik dari masyarakat atau pasar.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau, telah diusahakan untuk dapat menampung substansi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan arahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau 2006-2026, keberadaannya dinilai penting untuk acuan Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat dan swasta .

Untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Berau yang tertera didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau yang diamanatkan pada UU Nomor 25 Tahun 2004, ini terbuka untuk dikritisi oleh demi pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau ini sangat ditentukan oleh komitmen dari semua pihak eksekutif, legislative dan masyarakat

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan pembangunan demi terciptanya Visi Misi Kabupaten Berau Tahun 2026.

BUPATI BERAU

ttd

Drs.H.Makmur,HAPK.MM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau

Drs.H. Ibnu Sina Asyari
Nip. 010 103 606